

RENCANA STRATEGIS BISNIS

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2019—2023

Jalan Ir. Sutami 36-A, Ketingan, Surakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis) FKIP UNS Tahun 2019—2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra Bisnis ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan, penguatan, dan pemantapan program-program yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran FKIP UNS.

Berdasarkan Pasal 1 butir 14 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tugas LPTK adalah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan. Oleh karenanya, LPTK diharapkan dapat menyelenggarakan proses pendidikan yang menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.

Berdasarkan hal tersebut, FKIP UNS Surakarta merasa memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terarah dan berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat khususnya dalam bidang keguruan dan pendidikan. FKIP UNS sebagai bagian dari organisasi di UNS, telah mengembangkan tata kelola yang baik (*Good University Governance*) melalui organisasi yang sehat (*Healthy Organization*) dan kemandirian dalam pengelolaan (*Autonomy*).

Berdasarkan paparan di atas diperlukan suatu Rencana Strategis Bisnis FKIP UNS Tahun 2019—2023. Renstra Bisnis FKIP UNS ini disusun sebagai salah satu wujud komitmen yang tinggi dari FKIP UNS dalam upaya meningkatkan profesionalisme penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan dan dalam rangka pencapaian visi FKIP yaitu “Menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di bidang keguruan dan ilmu pendidikan bereputasi internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional”. Renstra Bisnis FKIP UNS 2019—2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman oleh civitas akademika FKIP UNS dalam melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan pada tingkat fakultas, program studi, dan unit kerja di lingkungan FKIP UNS.

Demikianlah Rencana Strategis Bisnis FKIP UNS 2019—2023 ini disusun semoga bermanfaat. Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan dan perbaikan Rencana Strategi Bisnis FKIP UNS 2019—2023 ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih.

Surakarta, Oktober 2019

Dekan FKIP UNS,

Dr. Mardiyana, M.Si.

NIP 19660225 199302 1 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Metode Perencanaan Strategis	7
1.4 Sistematika Penyajian	9
BAB II DESKRIPSI KEADAAN UMUM FKIP UNS.....	11
2.1 Sejarah Singkat FKIP UNS	12
2.2 Asas, Tata Nilai, Budaya Kerja FKIP UNS.....	17
2.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi FKIP UNS	20
BAB III ANALISIS LINGKUNGAN	37
3.1 Kondisi Awal.....	37
3.2 Identifikasi Isu-Isu Penting, Asumsi-Asumsi Dasar, dan Faktor Penentu Keberhasilan.....	41
3.3 Faktor Internal: Kekuatan dan Kelemahan	45
3.4 Faktor Eksternal: Peluang dan Tantangan	49
3.5 Analisis SWOT Penentuan Posisi FKIP UNS	51
BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
4.1 Visi, Misi, dan Tujuan.....	58
4.2 Visi dan Misi Rencana Strategis Bisnis (RSB) FKIP UNS 2019—2023	59
4.3 Arah Kebijakan, Prioritas, dan Program RSB FKIP UNS 2019—2023	59
4.4 Strategi Pendanaan FKIP UNS Melalui Penguatan Pendapatan di Non UKT	76
4.5 Proyeksi Pendapatan.....	76
4.6 Proyeksi Belanja	78
BAB V PENUTUP	79
5.1 Pedoman Transisi	79
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) merupakan salah satu fakultas di UNS yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang keguruan dan ilmu pendidikan. Tugas ini dilaksanakan dalam rangka turut serta mencapai tujuan negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberhasilan untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis bagi terselenggaranya pendidikan tinggi, dengan mengedepankan kualitas, kuantitas, dan produktivitas di bidang penelitian (riset) dan pengabdian pada masyarakat. Harapannya FKIP UNS mampu berkontribusi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembudayaan riset yang menghasilkan inovasi sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia (*nation's competitiveness*).

Sebagai salah satu fakultas di UNS, FKIP UNS harus mengembangkan tata kelola yang baik (*good university governance*) melalui organisasi yang sehat (*healthy organization*) dan kemandirian dalam pengelolaan (*autonomy*). Kondisi ini merupakan prasyarat untuk menyelenggarakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara efisien dan berdaya saing, serta memiliki reputasi yang tinggi dalam rangka menuju **visi FKIP UNS** yaitu “menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di bidang keguruan dan ilmu pendidikan bereputasi internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional” dengan slogan FKIP BAGUS (Berbudaya ACTIVE, Akseleratif, Global, Unggul, dan Santun) sebagai semangat mendukung visi FKIP UNS.

Sejak ditetapkannya UNS sebagai perguruan tinggi dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) pada tahun 2009, FKIP UNS memiliki keluwesan dalam mengelola sumber daya namun tetap bertanggungjawab, dengan mengedepankan efisiensi dan produktivitas. FKIP UNS pun dapat lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan mutu pelayanan masyarakat untuk memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan secara efektif, dan menjalankan praktik *not-for-profit business* yang sehat.

Capaian kinerja FKIP UNS tahun 2018–2020 telah menunjukkan hasil menggembirakan dan sangat berkontribusi pada peningkatan perangkungan kinerja UNS di tingkat nasional maupun internasional, antara lain ranking Webometrics Indonesia pada peringkat 5, ranking QS Indonesia pada peringkat 12, ranking Greenmetric Indonesia pada peringkat 7, ranking 4ICU Indonesia pada peringkat 8, dan Peringkat 11 perguruan tinggi terbaik klaster 1 tahun 2020 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Sebagian besar target sudah tercapai dan bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan. Dengan capaian ini, FKIP UNS dianggap mampu melakukan percepatan peraihan visi FKIP UNS menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di bidang keguruan dan ilmu pendidikan bereputasi internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional **pada tahun 2030**.

FKIP UNS juga berkontribusi untuk semakin menyakinkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang harapannya mampu mendorong UNS untuk segera menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH). Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan utama penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) FKIP UNS 2019—2023 ini, dengan senantiasa menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan (*sustainability*). Penyusunan RSB ini tentunya mengacu pada RSB sebelumnya dan mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Sebelas Maret (SPM-UNS), serta kebijakan akselerasi program dan kegiatan untuk mempercepat tercapainya **Visi FKIP UNS**, yaitu menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di bidang keguruan dan ilmu pendidikan bereputasi internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional pada tahun 2030.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis 2019—2023 secara yuridis formal berlandaskan pada peraturan perundang-undangan berikut ini.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586.
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 20) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 21) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 22) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional;
 - 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2006 tentang Rencana Bisnis Anggaran;
 - 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 - 26) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 tahun 2006 tentang Penerapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 - 27) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Sebelas Maret;
 - 28) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 29) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemdikbud;
 - 30) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
 - 31) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;

- 32) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1740);
- 33) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan UNS sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
- 34) Keputusan Menteri Ristekdikti Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret periode 2019-2023;
- 35) Peraturan Rektor UNS Nomor: 7/UN27/KP/2019 tentang “Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala Pusat di Universitas;
- 36) Keputusan Rektor UNS Nomor 504/UN27/HK/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019—2023;
- 37) Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 511/UN27/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode 2019—2023;
- 38) Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 524/UN27/KP/2019 tentang Pengangkatan Kepala Program Studi Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019–2023;
- 39) Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31A/UN27/KP/2020 tentang Pengangkatan Pengelola Unit Penjaminan Mutu Universitas Sebelas Maret;
- 40) Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 820A/UN27/KP/2020 tentang Pengangkatan Pengelola Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2019-2020;
- 41) Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS Nomor 7885/UN27.02/HK/2109 Tentang SK Pengangkatan Tim Koordinator Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019—2020;
- 42) Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS Nomor 8333/UN27.02/HK/2019 Tentang SK Pengangkatan Tim Pengelola Unit

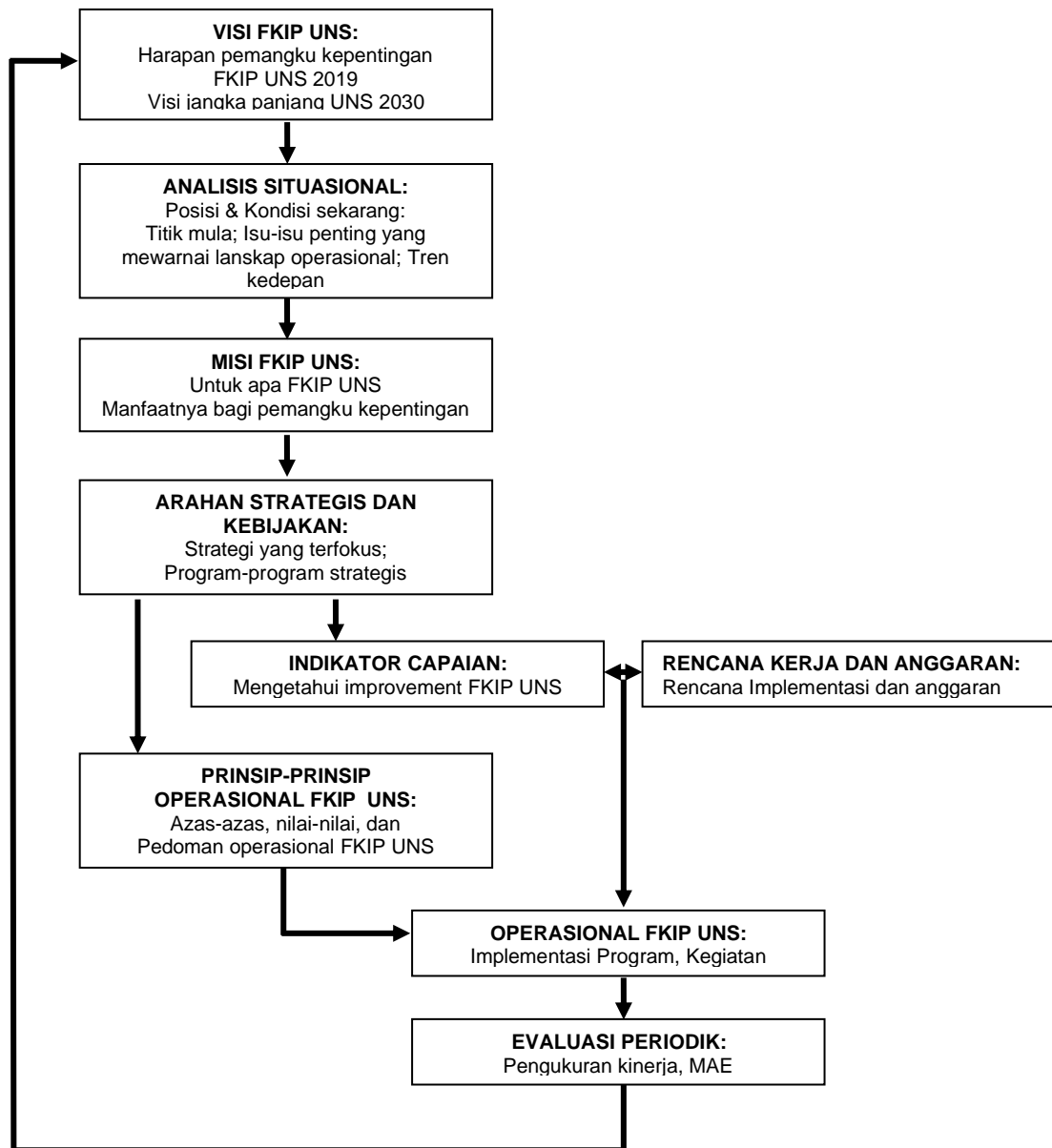
Pembinaan dan Pengembangan Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019—2021;

43) Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS Nomor 968/UN27.02/HK/2020 Tentang SK Pengangkatan Pengelola Unit Pelaksana Praktik Kependidikan Terpadu (UP2KT) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020;

44) Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS Nomor 970/UN27.02/HK/2020 Tentang SK Pengangkatan Tim Pengelola *International Office* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020;

1.3 Metode Perencanaan Strategis

RSB FKIP UNS Tahun 2019—2023 ini disusun dengan metode partisipatif dengan melibatkan seluruh *stakeholder* FKIP UNS. Perencanaan diawali dengan melakukan evaluasi diri (*self evaluation*) untuk mengetahui *existing condition* kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman melalui analisis *strength, weakness, opportunity, threat* (SWOT/KKPA) yang dimiliki dan dihadapi FKIP UNS. Hasil analisis SWOT FKIP UNS digunakan sebagai dasar penyusunan RSB FKIP UNS Percepatan, yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi dan kebijakan pencapaiannya.



Gambar 1. 2 Model Alur Kerja Penyusunan RSB FKIP UNS 2019 - 2023

Proses penyusunan RSB FKIP UNS 2019—2023 menggunakan model alur kerja *office of quality improvement* dari *University of Wisconsin Madison* (dengan beberapa penyesuaian) dalam *A Collection of Planning Corner Articles*, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.2

Strategi implementasi RSB FKIP UNS 2019—2023 dijalankan melalui penyusunan program, kegiatan, anggaran, dan kerangka implementasi (sinkronisasi koordinasi, dan tata kelola; distribusi urusan berdasar kegiatan; sistem pengawasan internal; dan mekanisme dan instrumen pemantauan/evaluasi). Hasil capaian RSB FKIP UNS dievaluasi secara periodik untuk mengetahui kemajuannya. Keberhasilan

program dapat diketahui berdasarkan pemenuhan target yang ditetapkan pada *Key Performance Indicator* (KPI) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Capaian indikator merupakan salah satu ukuran yang dipertimbangkan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran periode berikutnya.

1.4 Sistematika Penyajian

RSB FKIP UNS 2019—2023 disajikan dalam sistematika sebagai berikut.

Bab 1. Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang penyusunan RSB FKIP UNS 2019—2023, pengertian, maksud dan tujuan disusunnya RSB FKIP UNS 2019—2023. Landasan hukum penyusunan, Sinkronisasi RSB FKIP UNS 2019—2023 dengan dokumen perencanaan lainnya di FKIP UNS serta sistematika penyajian.

Bab 2. Kondisi Umum FKIP UNS

Mendeskripsikan tentang sejarah ringkas, nilai dasar, visi dan misi, makna nilai dasar dan visi FKIP UNS, tujuan FKIP UNS, Organisasi serta tugas pokok dan fungsi organisasi Fakultas.

Bab 3. Analisis Lingkungan dan Isu Strategis

Mengungkap berbagai kondisi yang terdapat di lingkungan, baik eksternal maupun internal, berupa peluang untuk dieksploitasi dan tantangan yang harus mendapatkan fokus perhatian. Di sisi internal, disajikan berbagai kekuatan dan beberapa kelemahan yang dimiliki FKIP UNS. Metode yang dilakukan adalah dengan analisis *Strength, Weakness, Oportunity, Threat* (SWOT) untuk mengukur kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Pada bab ini juga akan disampaikan analisis untuk memprediksi situasi yang akan terjadi pada masa mendatang serta arah FKIP UNS ke depan sesuai dengan kondisi yang paling mungkin terjadi.

BAB 4. Visi FKIP UNS dan Arah Kebijakan RSB 2019—2023

Pada bab ini dijelaskan visi FKIP UNS, kebijakan arah pengembangan FKIP UNS kurun waktu 2019 hingga 2023.

BAB 5. Penutup

Menyajikan pentingnya dokumen RSB FKIP UNS 2019—2023 sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan FKIP UNS dalam menyusun renstra unit kerja, serta aturan transisi terkait dengan aturan hukum di FKIP UNS.

BAB II

DESKRIPSI KEADAAN UMUM FKIP UNS

Pada tahun 2019 ini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) memasuki usia keempat puluh tiga dalam berkontribusi terhadap proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Peradaban dunia berkembang begitu cepat dan mengalami perubahan-perubahan di berbagai aspek kehidupan terutama di penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) bidang keguruan dan ilmu pendidikan, yang merupakan salah satu aspek esensial dari perkembangan dan aktualisasi potensi insani hakiki guna mewujudkan peradaban manusia. Pentingnya keberadaan perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat berkaitan erat dengan kapasitas perguruan tinggi dalam pengembangan dan penyebarluasan IPTEK tersebut. Perguruan tinggi pada dasarnya adalah sebuah institusi pengetahuan dan sekaligus institusi sosial. Sebagai institusi pengetahuan, perguruan tinggi mempunyai tugas berkenaan dengan pengayaan, pengembangan, dan penyebarluasan IPTEK, serta penyiapan sumber daya IPTEK. Sementara itu, sebagai institusi sosial, perguruan tinggi merupakan bagian dari dinamika masyarakat di mana perguruan tinggi berdiri, berkembang, dan berperan.

Dalam perkembangan dan kemajuannya yang begitu cepat pada usia yang relatif masih muda, FKIP UNS telah mampu meraih berbagai prestasi dan membuktikan eksistensinya di tingkat nasional. Dengan diraihnya sebagian besar prodi di FKIP UNS berpredikat unggul (A) dari Badan Akreditasi Nasional (BAN), sudah seyogyanya kini prodi-prodi di FKIP UNS mulai berakselerasi untuk peraihan reputasi internasional secara menyeluruh.

Tetap berpijak dan bertopang pada nilai-nilai budaya dan sejarah perkembangannya yang seiring dan sejalan membentuk karakter institusi semakin unggul. Karakter sebagai Perguruan Tinggi yang semakin berkembang terlihat pada perjalanan sekaligus sebagai tahapan tonggak sejarah berdirinya Universitas di Kota Bengawan, khususnya FKIP UNS.

2.1 Sejarah Singkat FKIP UNS

Sejarah dan perkembangan FKIP UNS tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang pendidikan guru di Indonesia yang berawal dari akhir masa penjajahan Belanda. Pada masa itu, seorang guru sekolah desa adalah lulusan sekolah CVO (*Cursus Voor Volk Onderwijser*), seorang guru SD nomor dua adalah lulusan *Normal School*, seorang guru *Holland Irlanders School* (HIS/Sekolah Dasar Belanda) adalah lulusan HIK, dan seorang guru MULO (SMP) adalah lulusan *Hoofdt Acte*.

Setelah kemerdekaan, pada tahun 1951 pemerintah mendirikan Sekolah Guru B (SGB) untuk mendidik calon guru SD. Selanjutnya, pada tahun 1957, SGB meningkat menjadi Sekolah Guru A (SGA) ditambah kursus B1 untuk mendidik calon guru SLP dan SGA ditambah kursus B2 untuk mendidik calon guru SLA. Ada juga diangkat lulusan *Candidat 1 (C-1)* dan *Candidat 2 (C-2)* universitas dalam bidang studi yang relevan guna memenuhi kebutuhan Guru SMA. Pada tahun 1960, kedua lembaga tersebut disatukan menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Kursus Pendidikan Guru (KPG) bagi guru yang belum memenuhi syarat menjadi guru SD.

Tahun 1989, persyaratan menjadi guru SD ditingkatkan menjadi minimal lulusan Program Diploma II (D-II). Sementara itu, penyelenggaraan pendidikan calon guru SLTA di tingkat perguruan tinggi adalah Pendidikan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang didirikan tahun 1954 di beberapa kota di Indonesia antara lain di kota Bandung. Pada tahun 1957, PTPG bergabung dengan universitas menjadi FKIP dan pada tahun 1963 ada beberapa FKIP yang berdiri sendiri menjadi IKIP.

IKIP/FKIP semula mendidik calon guru SLTA namun pada perkembangannya juga mendidik calon guru SLTP dengan *crash-program* dan tahun 1989 ditugasi pula mendidik calon guru TK dan SD melalui program Diploma II PGTK dan DII PGSD. Pada tahun 2006 ditingkatkan menjadi jenjang S1 PG PAUD yang memiliki konsentrasi lulusan sebagai pendidik pada Kelompok Bermain atau menjadi guru pada Taman Kanak-Kanak.

Adapun sejarah penyelenggaraan pendidikan guru di kota Surakarta dimulai pada tahun 1951 dengan didirikannya kursus B1 Jurusan Tata Negara dan kursus B1 Pendidikan Jasmani. Pada tahun 1966, kedua lembaga tersebut ditingkatkan menjadi IKIP Negeri Surakarta berdasarkan SK Menteri PTIP Nomor 05 Tahun 1966

tertanggal 22 Januari 1966 dan Sekolah Tinggi Olahraga Surakarta (STO) dengan berdasarkan SK Menteri Olahraga Nomor 40 Tahun 1967 tanggal 1 April 1967.

Sesuai perkembangan pendidikan dan tuntutan masyarakat Surakarta maka pada tahun 1976 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 10 tahun 1976 tanggal 08 Maret 1976 didirikan sebuah universitas negeri di Surakarta dengan nama Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret dan disingkat UNS, yang merupakan penyatuan dari 5 (lima) perguruan tinggi yang ada di Surakarta pada waktu itu, yaitu (1) IKIP Negeri Surakarta, (2) Sekolah Tinggi Olahraga (STO) Negeri Surakarta, (3) Akademi Administrasi Niaga (AAN) Negeri Surakarta, (4) Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional Veteran (PTPN Veteran) cabang Surakarta, dan (5) Universitas Gabungan Surakarta (UGS). Penyatuan perguruan tinggi di Surakarta tersebut diberi nama Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS). Selanjutnya dengan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1982 nama tersebut berubah menjadi Universitas Sebelas Maret dengan singkatan UNS, yang memiliki 9 (sembilan) fakultas, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan, Fakultas Sastra Budaya, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknik.

Dalam perkembangan selanjutnya, 2 (dua) fakultas mengalami penggabungan yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dan Fakultas Keguruan digabung menjadi satu fakultas, yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) hingga sekarang. Dengan izin penyelenggaraan program pendidikan program sarjana kependidikan oleh Dirjen Dikti Depdikbud No. 39/DIKTI/KEP/1984 tanggal 28 Juni 1984, FKIP UNS mengelola 6 jurusan dan 22 program studi. Namun, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pada tahun 1996, pemerintah dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 222/DIKTI/KEP/1996 tanggal 11 Juli 1996 kembali melakukan penggabungan dan penutupan beberapa prodi pada pendidikan tinggi termasuk FKIP UNS hingga tinggal memiliki 6 jurusan dan 16 program studi.

Hingga pada tahun 2000, pemerintah kembali mengizinkan penyelenggaraan prodi baru pada FKIP UNS yakni Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 442/DIKTI/KEP/2000 tanggal 20 Desember 2000, dan penataan dan penetapan kelembagaan jurusan dan program studi di lingkungan FKIP UNS pada tahun 1996, melalui dengan Keputusan Dirjen Dikti

No.140/DIKTI/KEP/2007 tanggal 21 September 2007, FKIP UNS memiliki 6 jurusan dan 22 program studi termasuk prodi baru yakni Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 564/D/T/2007, tanggal 20 Maret 2007.

Perkembangan FKIP UNS semakin besar dengan dibukanya kembali beberapa prodi yakni Prodi Bimbingan dan Konseling dengan izin No. 1625/D/T/2008, tanggal 15 Mei 2008, dan prodi baru yaitu Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) dengan izin No. 2326/D/T/2009 tanggal 07 Juli 2009, Prodi Pendidikan Bahasa Jawa dengan Keputusan Mendiknas No. 184/D/O/2010 tanggal 23 November 2010, dan Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan Keputusan Mendikbud No. 187/E/O/2012.

Selain pembukaan prodi baru, bersama LPTK lainnya, FKIP UNS ditunjuk Mendiknas untuk menyelenggarakan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan yakni Program Pengakuan Kerja dan Hasil Belajar (SKGJ-PPKHB) dengan Keputusan Mendiknas No. 015/P/2009 tanggal 16 Februari 2009, yang didukung Surat Edaran Direktur Ketenagaan No. 2053/D4.1/2010. Untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan tersebut maka Rektor UNS memberikan izin peminatan pada Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi yakni Minat Utama Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan Sekolah Dasar pada tahun 2011 dengan izin nomor 11538/UN27/PP/2011 tanggal 12 Desember 2011. Kemudian melalui Keputusan Rektor UNS Nomor 51A/UN27/PP2014 tanggal 24 Januari 2014 ditetapkan Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan Konsentrasi Akuntansi, Administrasi Perkantoran dan Tata Niaga. Dengan demikian kini FKIP UNS memiliki 25 program studi pendidikan jenjang S-1 (Sarjana Kependidikan).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 ditegaskan bahwa sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat. FKIP UNS tahun 2012 dipercaya oleh pemerintah menyelenggarakan Rintisan Program Kolaborasi

PPG SMK Kolaboratif berdasarkan SK Ditjen DIkti No 67a/Dikti/Kep/2012. Selain itu, FKIP UNS berdasarkan Surat Keputusan Ditjen Dikti No 17g/Dikti/Kep/2013 diberi tugas sebagai penyelenggara Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan tahun 2013-2016. FKIP UNS diberi tugas untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT) untuk Prodi PGSD dan PTM.

Sementara itu, penyelenggaraan Program Pascasarjana Kependidikan diawali pada tahun 1986 dengan pembukaan Program Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK) Program Studi Pendidikan Sejarah yang menginduk pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Jakarta tahun 1986. Program KPK tersebut berada di bawah pengelolaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS. Selanjutnya secara bertahap dibuka Program Pendidikan Pascasarjana (Jenjang S2/ Magister) non kependidikan yakni Program Magister Linguistik pada tahun 1997, dan Program Magister Ilmu Lingkungan pada tahun 1998. Kedua program studi tersebut menjadi rintisan pembentukan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (PPs UNS) dengan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 463/J27/KP/1999 dan No. 778/H27/PP/2007 tentang Pengelolaan Program Studi Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Sebelas Maret.

Hingga tahun 2013, berdasarkan Peraturan Rektor UNS No. 682/UN27/HK/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor disebutkan bahwa program studi magister dan atau doktor yang bersifat satu disiplin dengan program sarjana dapat diselenggarakan di fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik disiplin ilmu tersebut dan berada di bawah tanggung jawab dekan, demikian pula program studi magister dan/ atau doktor yang bersifat lintas program studi intra fakultas; maka melalui keputusan Rektor UNS Nomor 24/UN27/PP/2014 tanggal 02 Januari 2014, tentang Penetapan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Kependidikan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; beberapa program studi magister (S-2) dan doktor (S-3) kependidikan dikelola dan diselenggarakan oleh FKIP UNS yakni

- S-2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
- S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia
- S-2 Pendidikan Bahasa Inggris

- S-2 Pendidikan Matematika
- S-2 Pendidikan Sains
- S-2 Teknologi Pendidikan
- S-2 Pendidikan Ekonomi
- S-2 Pendidikan Sejarah
- S-3 Ilmu Pendidikan
- S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia
- S-3 Pendidikan IPA

Selanjutnya pada tahun 2014 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 419/E/O/2014 tanggal 17 September 2014, Universitas Sebelas Maret diizinkan menyelenggarakan program-program studi baru, yaitu Program Studi S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Program Studi S-1 Pendidikan Akuntansi, Program Studi Magister (S-2) Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Program Studi Magister (S-2) Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Studi Magister (S-2) Pendidikan Luar Biasa, dan Program Studi Magister (S-2) Pendidikan Seni. Namun, pembinaan dan pengawasan bagi program studi magister kependidikan baru ini dilaksanakan oleh Program Pascasarjana UNS.

Pada tahun 2015, FKIP UNS mengusulkan pembukaan 10 prodi baru yang terdiri atas 3 (tiga) Prodi S-1, 5 (lima) Prodi S-2, dan 2 (dua) Prodi S-3. Dari 10 usulan tersebut, hanya 4 (empat) prodi yang disetujui oleh Dikti dengan dikeluarkannya izin operasional pada bulan November 2015. Sementara itu, 6 (enam) prodi lainnya diminta untuk memperbaiki usulannya. Prodi baru yang disetujui izin operasionalnya adalah

- S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PIPA)
- S-2 Pendidikan Biologi
- S-2 Pendidikan Fisika
- S-2 Pendidikan Kimia

Prodi baru yang diminta untuk memperbaiki proposal pengajuan prodi baru adalah

- S-1 Pendidikan Vokasional Teknik Otomotif (PVTO)
- S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS)

- S-2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
- S-2 Pendidikan Guru Vokasi (PGV)
- S-3 Pendidikan Ekonomi
- S-3 Pendidikan Sejarah

Dari enam usulan perbaikan di atas, sampai saat ini yang mendapatkan izin adalah S-1 PVTO dan S-1 PIPS. Dengan demikian, hingga tahun 2019 ini, FKIP UNS menyelenggarakan 47 program studi, dengan perincian 24 program studi sarjana (S-1), 1 program studi Pendidikan Profesi Guru (PPG), 17 program studi magister kependidikan (S-2), dan 5 program studi doktor kependidikan (S-3).

2.2 Asas, Tata Nilai, Budaya Kerja FKIP UNS

2.2.1 Asas

- a) Asas kebenaran ilmiah;
- b) Asas pengembangan budaya luhur dan peradaban kehidupan bangsa;
- c) Asas kebutuhan, manfaat, dan efektivitas;
- d) Asas tata kelola universitas yang baik.

2.2.2 Tata Nilai

Pengembangan FKIP UNS sebagai fakultas unggulan nasional menuju fakultas bereputasi internasional (*internationally reputable faculty*) didasarkan pada nilai-nilai yang dianut FKIP UNS sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Nilai-Nilai yang Dianut FKIP UNS

Aspek	Nilai nilai yang dianut
Nilai masukan yang tepat untuk memulai proses akademik yang baik dan mencegah kegagalan	<ul style="list-style-type: none"> a. nilai edukatif b. nilai ilmiah c. nilai integritas dan amanah
Nilai proses yang terselenggara dan tertanam dengan baik untuk meningkatkan mutu interaksi dan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. nilai visioner dan keteladanan b. nilai pemberdayaan c. nilai ekonomis dan ekologis d. nilai etis dan legal e. nilai profesional dan akuntabel

Nilai luaran yang dipikirkan dengan baik dan menjadi pemandu untuk menghasilkan mutu tinggi	a. nilai inovatif dan antisipatif b. nilai estetis c. nilai keadilan, demokratis, dan inklusif
--	--

(Sumber: Dokumen Hasil Rumusan Rapim UNS tgl. 8 September 2007)

Seperangkat nilai FKIP UNS tersebut dikembangkan sebagai pemandu normatif untuk dihayati dan diberlakukan dalam institusionalisasi ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) bidang keguruan dan ilmu pendidikan.

2.2.3 Budaya Kerja FKIP UNS

Sejalan dengan budaya kerja UNS, FKIP UNS mengembangkan budaya kerja yang diarahkan sebagai tuntunan sikap dan perilaku seluruh sivitas akademika. Dengan demikian, budaya kerja tidak sekadar menjadi slogan tetapi diharapkan dapat menjadi jiwa dan semangat kerja dalam upaya mewujudkan visi dan misi FKIP UNS. Budaya kerja tersebut kemudian dikemas dalam slogan “**UNS ACTIVE**”, yang penjabarannya disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 *Budaya Kerja FKIP UNS*

BUDAYA KERJA	DEFINISI	ASPEK
ACHIEVEMENT ORIENTATION (Orientasi Berprestasi)	Kemampuan untuk bekerja dengan baik dan berusaha melampaui standar prestasi yang ditetapkan, berorientasi pada hasil dan terus menerus melakukan upaya untuk meraih keunggulan	1. Standar prestasi 2. Ide kreatif 3. Keahlian 4. Orientasi pada hasil 5. Keunggulan 6. Kesempurnaan
CUSTOMER SATISFACTION (Kepuasan Pengguna Jasa)	Kemampuan untuk membantu atau melayani orang lain atau memenuhi kebutuhan pengguna jasa, baik internal maupun eksternal	1. Proaktif 2. Daya cepat tanggap 3. Fokus pada pengguna jasa 4. Empati 5. <i>Active Listener</i> 6. Interaksi 7. Keterbukaan

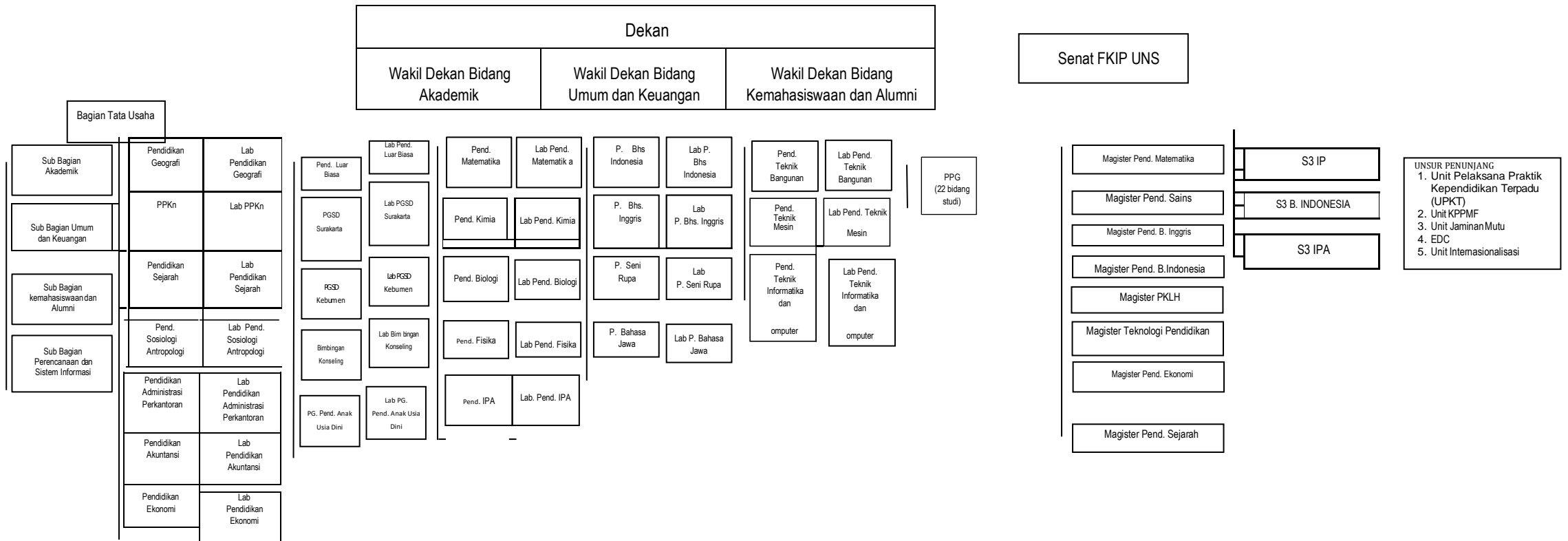
TEAMWORK (Kerjasama)	Kemampuan bekerja bersama orang lain, baik dalam tim besar maupun tim kecil dalam ruang lingkup institusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi 2. Kontribusi 3. Kerjasama 4. Fokus pada kinerja tim 5. Toleransi
INTEGRITY (Integritas)	Satunya kata dengan perbuatan, kemampuan mendeskripsikan maksud, ide dan perasaan, serta menerjemahkan seutuhnya ke dalam perbuatan yang dilandasi dengan ketulusan, kesetiaan, rasa tanggung jawab dan komitmen yang tinggi terhadap kemajuan organisasi selaras dengan visi dan misi UNS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas 2. Kejujuran 3. Tanggung jawab 4. Konsistensi 5. Kedisiplinan 6. Komitmen 7. Loyalitas
VISIONARY (Visioner)	Kemampuan menetapkan sasaran baru ketika target yang ditetapkan telah tercapai dan berorientasi jangka panjang, termasuk kemampuan menyesuaikan perubahan lingkungan dan mudah menerima perubahan dalam institusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan berkelanjutan 2. Perwujudan ide menjadi tindakan 3. Inovasi 4. Reputasi 5. Pengelolaan perubahan
ENTREPRENEURSHIP (Kewirausahaan)	Kemampuan mengolah sumberdaya yang ada menjadi suatu produk dan jasa yang mempunyai nilai tambah dan mencari keuntungan/keunggulan dari peluang yang belum dikembangkan orang lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemandirian 2. Kesejahteraan bersama 3. Kreativitas 4. Nilai tambah 5. Kewirausahaan

2.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi FKIP UNS

FKIP UNS mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik tingkat sarjana, magister dan Doktor bidang keguruan dan ilmu pendidikan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, UNS mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi;
2. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
4. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
5. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.

Struktur organisasi FKIP terdiri atas Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Senat, Kepala Progam Studi, Ketua Laboratorium, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan unit penunjang lain. Struktur Organisasi FKIP periode 2019—2023.



Gambar 1. Struktur Organisasi FKIP UNS

Deskripsi tugas dari perangkat kelembagaan yang tercantum dalam struktur organisasi FKIP UNS dijelaskan sebagai berikut.

1. Dekan

Tugas Dekan adalah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat; membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan administrasi fakultas.

Secara rinci, tugas Dekan adalah sebagai berikut.

- a Menyusun rencana kerja fakultas;
- b Merumuskan kebijakan fakultas dengan persetujuan senat;
- c Menetapkan kebijakan operasional dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi;
- d Menetapkan kebijakan operasional dalam pelaksanaan bidang akademik, umum dan keuangan, serta kemahasiswaan;
- e Mengoordinasikan kegiatan senat;
- f Mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bawahan;
- g Membina bawahan untuk meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan dalam bekerja;
- h Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- i Menjalin kerja sama dengan instansi lain;
- j Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- k Melaksanakan tugas lain dari atasan.

2. Wakil Dekan Bidang Akademik

Wakil Dekan Bidang Akademik memiliki tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Secara rinci, tugas Wakil Dekan Bidang Akademik adalah sebagai berikut.

- a Menyusun rencana kerja fakultas bidang pendidikan dan pengajaran; penelitian, pengabdian masyarakat dan kerja sama;
- b Menetapkan kebijakan teknis bidang akademik;
- c Mengoordinasikan pelaksanaan tugas tridharma Perguruan Tinggi;
- d Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- e Membina bawahan untuk meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan

- dalam bekerja;
- f. Menjalinkan kerja sama tridharma Perguruan Tinggi dengan instansi lain;
 - g. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - h. Melaksanakan tugas lain dari atasan.

3. Wakil Dekan Bidang Administrasi, Umum, dan Keuangan

Wakil Dekan Bidang Administrasi, Umum, dan Keuangan memiliki tugas membantu Dekan dalam hal memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi, umum, keuangan, dan juga sistem informasi.

Secara rinci, tugas Wakil Dekan Bidang Administrasi, Umum, dan Keuangan adalah sebagai berikut.

- a. Menyusun rencana kerja fakultas bidang umum dan keuangan;
- b. Menetapkan kebijakan teknis bidang umum dan keuangan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang umum dan keuangan;
- d. Mendukung pelaksanaan tugas tridharma Perguruan Tinggi;
- e. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Membina bawahan untuk meningkatkan kedisiplinan kerja;
- g. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas lain dari atasan.

4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang memiliki tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta layanan kesejahteraan mahasiswa.

Secara rinci, tugas Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah sebagai berikut.

- a. Menyusun rencana kerja fakultas bidang kemahasiswaan;
- b. Menetapkan kebijakan teknis pembinaan dan kesejahteraan mahasiswa;
- c. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan mahasiswa;
- d. Mendukung peningkatan prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa;

- e. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan mahasiswa;
- f. Membina bawahan untuk meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan kerja;
- g. Menjalin kerja sama dengan alumni dan instansi lain;
- h. Memberikan layanan kepada masyarakat;
- i. Melaksanakan tugas lain dari atasan.

5. Senat Fakultas

Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas. Senat fakultas terdiri dari guru besar, pemimpin fakultas, dan perwakilan dosen dari setiap program studi. Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua Senat dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih di antara para anggota.

Adapun tugas pokok Senat Fakultas adalah sebagai berikut.

- a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas;
- b. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
- c. Merumuskan kaidah dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di fakultas;
- d. memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja fakultas yang diajukan oleh pimpinan fakultas;
- e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f. Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi dekan dan dosen yang diusulkan untuk mendapatkan kenaikan jabatan akademik;
- g. menegakkan kaidah-kaidah yang berlaku bagi sivitas akademika.

6. Unsur Pelaksana Akademik

Unsur pelaksana akademik terdiri dari tiga unsur, yaitu program studi, laboratorium, dan dosen, dengan uraian tugas sebagai berikut.

a. Program studi (Prodi)

Program studi merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dekan. Program studi dipimpin oleh seorang kepala program studi dan bertanggung jawab langsung kepada dekan.

Tugas Kepala Prodi dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Membuat rencana pengembangan prodi;
- 2) Menyusun pembagian tugas perkuliahan;
- 3) Mengawasi kelancaran Proses Belajar Mengajar (PBM);
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan seminar proposal, seminar hasil, dan ujian pendadaran;
- 5) Mengoordinasikan pengumpulan nilai;
- 6) Mengoordinasikan kegiatan penelitian dan P2M;
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi mahasiswa dengan Pembimbing Akademik (PA);
- 8) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Laboratorium

Laboratorium merupakan unsur pelaksana akademik yang berfungsi membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di program studi terutama yang berkaitan dengan pembelajaran praktik. Ketua Laboratorium dipilih di antara tenaga pengajar dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Program Studi.

Tugas Ketua Laboratorium dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Membuat rencana pengembangan laboratorium prodi;
- 2) Membantu kepala prodi menyusun pembagian tugas perkuliahan;
- 3) Mengawasi kelancaran pelaksanaan praktik di laboratorium sebagai bagian dari PBM;
- 4) Mengoordinasikan penyusunan perangkat perkuliahan;
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban;

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Dosen

Dosen merupakan tenaga pengajar di lingkungan fakultas yang berada di bawah dekan dan bertanggung jawab langsung kepada dekan. Adapun tugas dosen dijelaskan berdasarkan jenjang kepangkatan, sebagai berikut.

1) Asisten Ahli

- a) Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- b) Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang sarjana;
- c) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- d) Mengembangkan bahan ajar;
- e) Menyampaikan presentasi ilmiah;
- f) Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional;
- g) Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain;
- h) Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/seni pertunjukan;
- i) Melaksanakan pengabdian masyarakat;
- j) Melaksanakan tugas penunjang.

2) Lektor

- a) Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- b) Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang sarjana bagi yang berijazah Magister;
- c) Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang Magister bagi yang berijazah Doktor dan membantu pengajaran program doktor;
- d) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- e) Mengembangkan bahan ajar;
- f) Menyampaikan presentasi ilmiah;
- g) Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi;

- k) Melaksanakan pengabdian masyarakat;
 - l) Melaksanakan tugas penunjang.
- 3) Lektor Kepala
- a) Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan;
 - b) Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor bagi yang bergelar doktor;
 - c) Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya atau lebih rendah pendidikannya;
 - d) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
 - e) Mengembangkan bahan ajar;
 - f) Menyampaikan presentasi ilmiah;
 - g) Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi;
 - h) Melaksanakan pengabdian masyarakat;
 - i) Melaksanakan tugas penunjang.
- 4) Guru Besar
- a) Mengikuti TOT dan/atau pelatihan;
 - b) Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor;
 - c) Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya;
 - d) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
 - e) Mengembangkan bahan ajar;
 - f) Menyampaikan presentasi ilmiah;
 - g) Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi;
 - h) Melaksanakan pengabdian masyarakat;
 - i) Melaksanakan tugas penunjang.

7. Unsur Penunjang

Unsur penunjang meliputi unsur pelaksanaan administrasi serta unit pelaksana di fakultas. Unsur pelaksana administrasi terdiri dari tenaga kependidikan yang memberikan pelayanan administrasi pendidikan. Sementara

itu, unit pelaksana terdiri dari unsur dosen yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya. Secara terperinci tugas dari unsur penunjang dijelaskan sebagai berikut.

a Unsur Pelaksanaan Administrasi

Unsur pelaksana administrasi juga disebut bagian tata usaha. Bagian tata usaha merupakan penunjang kelancaran tugas pimpinan fakultas yang melaksanakan kegiatan administrasi. Bagian ini terdiri dari empat subbagian, yaitu subbagian pendidikan; subbagian umum, perlengkapan, keuangan dan pegawai; subbagian kemahasiswaan; dan subbagian perencanaan dan sistem informasi. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut.

1) Subbagian akademik

- a) melakukan administrasi pendidikan;
- b) melakukan administrasi penelitian;
- c) melakukan administrasi pengabdian pada masyarakat.

2) Subbagian Keuangan dan Umum

- a) melakukan administrasi keuangan;
- b) melakukan administrasi kepegawaian;
- c) melakukan urusan tata usaha;
- d) melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

3) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni

- a) melakukan administrasi kemahasiswaan;
- b) melakukan administrasi alumni.

4) Subbagian Perencanaan dan Informasi

- a) membuat perencanaan, monitoring dan evaluasi program kerja;
- b) mengelola data dan informasi fakultas.

b Unit Pelaksana Akademik Tri Dharma Perguruan Tinggi

Unit Pelaksana Akademik di FKIP UNS terdiri dari sebelas (11) bidang, yaitu:

1) Unit *Education Development Center (EDC)*

EDC bertugas meningkatkan kinerja lembaga berbasis kerja sama dengan *Stakeholder* Fakultas.

- 2) Tim Perencanaan dan Pengembangan Fakultas (Renbang Fakultas)
Tim Renbang Fakultas bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dan pengembangan fakultas, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakultas.
- 3) Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF)
UPMF bertugas melakukan penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan, dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, mewujudkan visi dan misi fakultas.
- 4) Unit Pelaksana Praktik Kependidikan Terpadu (UP2KT)
UP2KT bertugas mengelola dan menyelenggarakan kegiatan intrakurikuler kependidikan berupa kegiatan magang kependidikan dan program pengalaman lapangan berupa kegiatan praktik kependidikan terintegrasi bagi mahasiswa.
- 5) Tim Skripsi, Tesis, dan Disertasi
Tim skripsi, tesis, dan disertasi bertugas menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi panduan penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi yang digunakan di FKIP.
- 6) Unit Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas (KPPMF)
KPPMF bertugas mengoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen di program studi, baik perorangan maupun kelompok.
- 7) Unit *International Office* Fakultas
IO Fakultas bertugas membantu dan memfasilitasi kerja sama dan hubungan internasional yang dilakukan oleh fakultas dan prodi-prodi.
- 8) Unit Pembinaan dan Pengembangan Jurnal Fakultas
Unit ini bertugas membina dan mengembangkan jurnal fakultas menjadi jurnal bereputasi.
- 9) Unit Pangkalan Data dan Informasi (Padati)
Padati bertugas memfasilitasi pembuatan *web hosting* untuk menunjang keberadaan web-web institusi fakultas dan prodi di FKIP,

mengelola instalasi jaringan komputer di fakultas, membuat dan mengembangkan aplikasi sistem informasi di lingkungan fakultas, membuat media pembelajaran interaktif berbasis multimedia, *maintenance system*, membuat *tracer study online*, serta mengelola dan instalasi titik hotspot di lingkungan fakultas.

10) Pembina Kegiatan Mahasiswa Fakultas

Pembina kegiatan mahasiswa bertugas membina dan mengawasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) agar ada peningkatan kualitas program, kegiatan, dan kelembagaan mahasiswa FKIP UNS.

11) Tim Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK)

Tim MKDK bertugas melakukan pengembangan perangkat pembelajaran untuk mata kuliah-mata kuliah dasar kependidikan di FKIP UNS.

8. Kepemimpinan

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku seluruh civitas akademika di FKIP UNS. Dekan mengarahkan civitas akademika agar mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi.

FKIP adalah ujung tombak operasionalnya UNS sehingga memerlukan pemimpin yang mampu mengakomodasi kepentingan semua civitas akademika. Pola kepemimpinan yang dikembangkan di FKIP adalah pola kepemimpinan yang demokratis, profesional, memiliki kemampuan, daya saing, dan keunggulan, yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas diri pribadi guna menjadi yang terbaik dan terdepan dalam lingkup kompetisi yang sehat, ksatria, dan mengedepankan norma serta aturan yang benar.

Pola kepemimpinan FKIP UNS terdiri dari dekan yang dibantu oleh tiga

wakil dekan, senat fakultas, kepala program studi, kepala laboratorium/bengkel, kepala bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional dosen. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi dan misi ke dalam kegiatan operasional program studi. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antarunit dalam organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerja sama dengan organisasi profesi, masyarakat, dan lembaga pemerintahan.

a. Kepemimpinan operasional

Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi dan misi UNS ke dalam kegiatan operasional fakultas yang dituangkan dalam rencana strategis (renstra). Jabaran kegiatan dalam renstra dilaksanakan sesuai dengan SOP yang tertuang dalam SK Dekan FKIP No.1005/H27.02/PP/2011. Berkaitan dengan hal tersebut, pimpinan fakultas menjabarkan visi, misi, dan tujuan ke dalam renstra, rencana operasional, dan berbagai kegiatan operasional fakultas. Perumusan ini dilakukan dengan memperhatikan standar pendidikan tinggi dan masukan dari *Stakeholder*. Seluruh kegiatan Fakultas dijalankan dengan menggunakan SOP (*Standard Operation Procedure*) yang ditetapkan oleh Universitas Sebelas Maret, meliputi tata kelola bidang akademik, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keuangan.

b. Kepemimpinan organisasi

Pimpinan fakultas mengarahkan dan mempengaruhi perilaku seluruh civitas akademika agar berperilaku sesuai nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Pimpinan fakultas juga melakukan analisis prediksi terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk merumuskan rencana secara strategis dan realistis, kredibel, serta mengomunikasikannya kepada Rektor. Sesuai dengan visi dan misi FKIP UNS, maka pimpinan fakultas memberdayakan seluruh komponen, baik dosen maupun tenaga kependidikan, dalam melaksanakan kepemimpinannya dengan menetapkan

perincian tugas yang jelas dan selalu membuat target pencapaian yang dievaluasi secara rutin.

c. Kepemimpinan Publik

Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerja sama dan menjadi rujukan bagi publik. Berbagai kerja sama telah dilakukan oleh FKIP UNS, antara lain:

- 1) Bermitra dengan sekolah-sekolah dari tingkat PAUD sampai SMA/SMK di wilayah Solo Raya lewat koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing. Pada kegiatan ini FKIP UNS dipercaya menempatkan para mahasiswa untuk melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL), memenuhi permintaan rekrutmen guru baru untuk mengatasi kekurangan guru, pengembangan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan diklat peningkatan keterampilan produktif (keahlian), kurikulum dan silabus, pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, serta pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
- 2) Keterlibatan dalam Forum Komunikasi (Forkom) FKIP Negeri Indonesia. Dosen FKIP UNS yang pernah menjabat Ketua Forkom adalah Prof. Dr. Trisno Martono, M.M.;
- 3) Kerja sama dengan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud dalam penyusunan naskah kajian sistem pendampingan program pengembangan SMK dari tahun 2014;
- 4) Kerja sama dengan BAPPEDA di Kabupaten Ponorogo dan Magelang dalam Penyusunan *Master Plan* Pembangunan Ekonomi Daerah dan Sistem Informasi profil daerah pada tahun 2014;
- 5) Kerja sama dengan beberapa sekolah mitra dalam pendampingan kegiatan sekolah, misalnya di SMA MTA untuk pembinaan Olimpiade Sains Nasional;
- 6) Kerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam Pengembangan dan Sosialisasi Program Adiwiyata Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Tingkat Kota untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) sejak tahun 2012 sampai sekarang;

- 7) Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, di antaranya dalam pengembangan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pedomannya. FKIP UNS juga diberikan mandat untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru SMK Produktif di bidang Teknik Mesin, Teknik Bangunan, dan Teknik Informatika;
- 8) Kerja sama dengan Direktorat Ketenagaan Kemendikbud dalam pelaksanaan kegiatan Program Sarjana Mengajar. FKIP UNS dipercaya melaksanakan program ini bahkan mengkoordinasikan perguruan tinggi lain di Indonesia. Program Sarjana Mengajar bertujuan memenuhi kekurangan guru produktif SMK di seluruh Indonesia. Sarjana-sarjana pendidikan kejuruan yang baru lulus direkrut untuk ditugaskan mengajar dan tugas kependidikan yang lain selama 1 tahun di SMK-SMK yang kekurangan guru di seluruh wilayah Indonesia. Program ini merupakan penyempurnaan dan alih nama dari Program Pendampingan SMK yang sudah berjalan sejak tahun 2009.

Peran pimpinan FKIP di luar UNS antara lain:

- 1) Ketua Pengurus Indo MS wilayah DIY & Jateng periode 2013—2014 a.n. Dr. Mardiyana, M.Si (Dekan FKIP UNS)
- 2) Ketua Pengurus Indo MS wilayah DIY & Jateng periode 2015—2016 a.n. Dr. Mardiyana, M.Si (Dekan FKIP UNS)
- 3) Penasihat Pengurus Indo MS wilayah DIY & Jateng periode 2018—2020 a.n. Dr. Mardiyana, M.Si (Dekan FKIP UNS)
- 4) Pengurus Asosiasi Pendidik Seni Divisi Penelitian APSI a.n. Prof. Slamet Subiyantoro, M.Si, (Wakil Dekan Bidang Akademik)
- 5) Dewan Pakar Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Super Semar a.n. Prof. Slamet Subiyantoro, M.Si, (Wakil Dekan Bidang Akademik)
- 6) Dewan Riset Daerah Surakarta 2019—2023 a.n. Dr. Dewi Kusumawardani, M.Si (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)
- 7) Ketua Asosiasi Profesi Pendidik Ekonomi (Aspropendo) a.n. Dr. Dewi Kusumawardani, M.Si (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)

- 8) Ketua Komite TK Handayani tahun 2018—2023 a.n. Dr. Djono, M.Pd.
(Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan)

Untuk mendorong jejaring dan kerja sama, sejak tahun 2016 FKIP UNS telah melakukan rintisan kerja sama dengan beberapa universitas di Luar Negeri seperti di (1) Malaysia, (2) Thailand, (3) Filipina, (4) Brunai Darussalam, (5) Singapura, (6) Timor Leste, (7) Taiwan, (8) Korea Selatan, (9) Jepang, (10) India, (11) Austria, (12) Jerman, (13) Romania, (14) Australia, dan (15) Amerika Serikat. Prioritas kerja sama tersebut lebih menitikberatkan pada bidang: kolaborasi riset; *exchange* program; penyelenggaraan *double degree*; dan studi lanjut program Doktor. Ke depan jaringan kerjasama yang lebih efektif dan berhasil guna perlu ditingkatkan, tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga dari segi kualitas dalam aktivitas.

9. Stakeholder

Merujuk pada tugas dan fungsi sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0201/0/1995 Pemerintah, Pemangku kepentingan utama (*Key Stakeholder*) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS adalah:

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi (TK/RA, SD/MI/SDLB SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMLB, dan SMK/MAK, Lingkup PT/PTS/ST);

- a. Pegawai/karyawan FKIP UNS (Fungsional, Struktural, Staf);
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti; dan Direktorat lain terkait;
- c. Departemen Tenaga Kerja; Departemen Perindustrian; Departemen Agama, dll;
- d. Perguruan Tinggi lain baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga diklat, mahasiswa;
- e. Badan Kepegawaian serta Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten dan Kota;
- f. Donatur/penyandang dana, Ikatan tali asih dengan para peduli pendidikan;
- g. Dunia Pendidikan, termasuk di dalamnya para pemerhati pendidikan;

- h. Masyarakat umum, Asosiasi Profesi dan Perusahaan (Dunia Usaha/Industri);
- i. Yayasan Ardhya Garini (Yasarini) Cabang Lanud Adi Soemarmo Surakarta; KB-TK, SD, SMP Angkasa;
- j. Yayasan Ardhya Garini (Yasarini) Cabang Lanud Adi Soemarmo Surakarta; SMA Pradita Dirgantara.

B. Permasalahan Utama yang Dihadapi Organisasi

Meskipun mengalami kendala dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan di FKIP UNS selama tahun anggaran 2019 berjalan dengan baik. Beberapa permasalahan yang muncul, baik dalam proses perencanaan maupun implementasi kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang program internasionalisasi

Terkait dengan program internasionalisasi, sebagian besar sarana dan prasarana di FKIP tidak memenuhi standar internasionalisasi, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana perkuliahan dan aktivitas seluruh civitas akademika. Standardisasi yang diperlukan antara lain ruang kuliah, ruang dosen, ruang pertemuan, sarana prasarana pembelajaran, toilet, layanan disabilitas, dan lain lain. Selain itu, FKIP juga mengelola 18 gedung yang tersebar di 5 lokasi. Hal ini berimbas pada besarnya biaya yang dibutuhkan untuk perawatan/pemeliharaan Gedung-gedung sehingga banyak dana yang tersedot untuk kegiatan tersebut.

2. Pengiriman mahasiswa ke luar negeri untuk mendukung terainya IKU. Fakultas mengirimkan banyak mahasiswa ke luar negeri agar dapat mendukung program internasionalisasi. Namun, dana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ini cukup besar sehingga harus diimbangi dengan penghematan anggaran pada kegiatan-kegiatan lain. Hal ini dilakukan karena pagu yang disediakan tidak dapat mencukupi semua kegiatan yang semestinya dilaksanakan.

3. Keterlambatan penetapan DIPA

Informasi tentang Penetapan DIPA diperoleh sekitar bulan Maret 2019, sehingga kegiatan-kegiatan di awal tahun harus mengalami penjadwalan ulang. Hal ini berakibat pada penundaan waktu pelaksanaan kegiatan bersamaan

dengan kalender perkuliahan sehingga mengganggu aktivitas perkuliahan.

4. Pendirian Fakultas Keolahragaan (FKOR)

Berpisahnya 2 Program Studi (Penjaskesrek dan Penkepor) menjadi Fakultas Keolahragaan (FKOR) juga turut memicu perubahan tatanan Struktur Organisasi dan rencana kegiatan pada anggaran tahun berjalan sehingga memerlukan banyak penyesuaian.

5. Revisi Anggaran dan kelambatan penetapan hasil revisi

Revisi anggaran terjadi sebanyak tiga kali (bulan April, Juli, dan Oktober) dan kelambatan penetapan revisi anggaran berakibat pada kelambatan realisasi kegiatan. Antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala ini adalah dengan melaksanakan kegiatan yang sudah definitif dan melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana talangan.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN

3.1 Kondisi Awal

Situasi dan kondisi awal FKIP UNS pada saat penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) ini dijelaskan berdasarkan pada komponen-komponen yang mengacu pada indikator kinerja FKIP UNS tahun 2018/2019 sebagai berikut.

3.1.1 Pembelajaran

- a) Rasio dosen dan mahasiswa mengalami kenaikan menjadi 1:25 pada 2018.
- b) Kepuasan mahasiswa mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2015 dengan nilai 3,05, menjadi 3,2 pada tahun 2018.
- c) Tenaga pengajar/staf pendidik doktor mengalami kenaikan 37,3% pada tahun 2018.
- d) Jumlah program studi tersertifikasi/terakreditasi internasional juga meningkat. Pada tahun 2019, tercatat ada satu program studi yang memiliki sertifikasi internasional AUN-QA.

3.1.2 Keterserapan Lapangan Pekerjaan

- a) Reputasi penyedia kerja dengan skala tingkat ASEAN.
- b) Hasil *Tracer Study* menunjukkan bahwa 85% lulusan FKIP UNS mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari enam bulan setelah lulus.
- c) Kesesuaian pekerjaan dengan pendidikan pada tahun 2018 sebesar 78%.

3.1.3 Penelitian

- a) Sitasi jurnal internasional pada tahun 2018 adalah 550.
- b) Jumlah paten dan HAKI mengalami kenaikan menjadi 67 HKI pada tahun 2018.

3.1.4 Internasionalisasi

- a) Kolaborasi kelembagaan mengalami kenaikan menjadi 14 buah pada tahun 2018.
- b) Jumlah *inbound visiting lecturer* mengalami kenaikan menjadi 22 pada tahun 2019.

- c) Jumlah *outbound visiting lecturer* mengalami kenaikan dimana pada tahun 2012 dengan jumlah 1 menjadi 5 pada tahun 2018.
- d) Jumlah mahasiswa asing 9 orang pada tahun 2018.
- e) Jumlah *outbond* mahasiswa mengalami kenaikan dari jumlah 4 orang pada tahun 2015 menjadi 41 orang pada tahun 2018.
- f) Persentase *inbond* mahasiswa mengalami kenaikan dari jumlah 4 orang pada tahun 2015 menjadi 11 orang pada tahun 2018
- g) Keberagaman internasional/jumlah negara dari mahasiswa asing sebanyak 6 negara pada tahun 2018.
- h) Prestasi mahasiswa tingkat nasional mengalami kenaikan menjadi 389 prestasi pada tahun 2018.
- i) Prestasi mahasiswa tingkat internasional 3 prestasi pada tahun 2018

3.1.5 Fasilitas

- a) Fasilitas olahraga selama kurun waktu 2010—2017 mengalami kenaikan dari tahun 2010 sebanyak 2 fasilitas, meningkat menjadi 5 fasilitas pada tahun 2015 dan tetap stabil 5 fasilitas pada tahun 2017.
- b) *Dormitory*/jumlah mahasiswa yang bisa diakomodasi selama kurun waktu 2010—2017 mengalami kenaikan dari jumlah 192 mahasiswa pada tahun 2010 meningkat menjadi 900 mahasiswa pada tahun 2014/2015 dan tetap stabil pada tahun 2017.
- c) Infrastruktur IT (peningkatan *bandwidth, mbps*) selama kurun waktu 2010—2017 mengalami kenaikan pesat dari tahun 2010 dengan jumlah 65 *mbps* meningkat menjadi 750 *mbps* pada tahun 2014/2015 dan pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 1800 *mbps*.
- d) Fasilitas perpustakaan (koleksi/jumlah) selama kurun waktu 2010—2017 mengalami kenaikan di mana pada tahun 2010 memiliki koleksi sejumlah 175.321 buah meningkat menjadi 223.759 buah pada tahun 2015. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 244.149 buah.
- e) Fasilitas kesehatan selama kurun waktu 2010—2015 mengalami kenaikan dari tahun 2010 hanya berjumlah 1 fasilitas meningkat menjadi 7 buah fasilitas pada tahun 2014/2015. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 8 buah.
- f) Jumlah organisasi mahasiswa yang terdaftar (UKM sehat) adalah 11 UKM.

- g) Rasio PNB/operasional pada tahun 2017 adalah 1 : 2,13.
- h) Rasio PNB/total anggaran selama kurun waktu 2011—2017 mengalami kenaikan di mana pada tahun 2011 dengan presentase sebesar 44,74% meningkat menjadi 51% pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 57,10%.
- i) Jumlah pendapatan kerja sama mengalami kenaikan dari tahun 2016 dengan pendapatan sejumlah 6,78 milyar pada tahun 2018.

3.1.6 Blended Learning

- a) Persentase teknologi terkini (jumlah PC terkoneksi IT) telah mencapai 100% sejak 2018.
- b) Mata kuliah yang disajikan secara *online (Learning Management System/SPADA)* mencapai 20% pada tahun 2018.

3.1.7 Budaya Kerja

- a) Budaya anti korupsi/ jumlah kasus korupsi
Belum ada kasus korupsi di UNS sampai tahun 2018.
- b) Opini auditor eksternal terhadap keuangan berturut mendapatkan WTP sejak tahun 2010 sampai tahun 2018.

3.1.8 Paten/HKI

- a) Jumlah paten/HKI nasional yang terdiri atas 1 paten, 56 hak cipta, dan 10 HKS
- b) Penelitian kompetitif
Mengalami kenaikan dari tahun 2015 dengan jumlah 90 judul penelitian menjadi 191 judul penelitian pada tahun 2018.

3.1.9 Komitmen

- a) Pengembangan dan investasi sosial (misal *expert* membantu perda, dll.)
- b) Kontribusi finansial untuk bencana nasional & internasional (5% terhadap total anggaran)
- c) Presentase propinsi asal mahasiswa UNS sebesar 100% dari seluruh jumlah provinsi di Indonesia.

d) Proporsi mahasiswa internasional (%)

Selama kurun waktu 2010-2015 mengalami kenaikan dari tahun 2010 dengan presentase 0,5% meningkat menjadi 0,9% pada tahun 2014/2015, sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 1,28 %.

e) Peringkat *green campus*

Pengelolaan *landscape* dan fisik kampus sebagai kampus berwawasan ramah lingkungan, UNS menempati peringkat 95 di dunia, 24 di Asia, atau peringkat 5 di Indonesia.

3.1.10 Akses

a) Mahasiswa internasional penerima beasiswa berjumlah 6 orang.

b) Akses untuk difabel mempunyai presentase sejumlah 20% pada tahun 2017.

c) Presentase jangkauan mahasiswa tidak mampu (prosentase penerima bidik misi) selama kurun waktu 2010—2017 mengalami peningkatan dari tahun 2010 dengan presentase sejumlah 8,02% meningkat menjadi menjadi 16,9%.

3.1.11 Reputasi Disiplin Ilmu

a) Jumlah keunggulan yang sudah diakui nasional (reputasi akademik/spesialisasi)

b) Jumlah keunggulan yang sudah diakui internasional.

Beberapa PT luar negeri sudah mempercayakan program SEATEACHER dan SEATEVET ke FKIP UNS.

3.1.12 Akreditasi Program Studi

a) Akreditasi prodi yang diakui nasional

Pada tahun 2018 prodi yang terakreditasi A sebanyak 47 % dari 45 program studi prodi yang dikelola oleh FKIP di semua jenjang, baik S-1, S-2, maupun S-3, yaitu 18 dari 23 program studi S-1, 6 dari 17 program studi S-2, dan 1 dari 5 program studi S-3.

b) Akreditasi prodi yang diakui internasional

Terdapat 1 program studi yang sudah tersertifikasi AUN-QA

c) Akreditasi unit manajemen diakui internasional/ISO mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebanyak 26 prodi.

3.2 Identifikasi Isu-Isu Penting, Asumsi-Asumsi Dasar, dan Faktor Penentu

Keberhasilan

Sebagai bagian dari instansi pemerintah, FKIP UNS tidak lepas dari arah pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah mereview struktur sistem pendidikan tinggi, misi institusi, dan pola pendanaannya. Restrukturisasi ini difokuskan pada pembentukan modal insani melalui pendidikan dan pelatihan, alokasi sumber daya untuk riset dan pengembangan, dan pembenahan tata kelola kelembagaan dan manajemen perguruan tinggi. Hal ini tercermin dalam visi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana disebutkan dalam Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2017 adalah:

“Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan IPTEK dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa”

Situasi dunia saat ini (dan masa depan) ditandai dengan lingkungan yang terus berubah dengan kecepatan yang tinggi, proses akselerasi pertumbuhan, kompleksitas problematika di mana setiap elemen berada dalam interdependensi yang erat, kait-mengait dan saling mempengaruhi. Menyadari bahwa lingkungan bisnis pendidikan tinggi yang makin kompetitif, FKIP UNS memerlukan tipe manajemen yang tidak hanya merespons perubahan yang akan terjadi tetapi juga perlu menciptakan masa depan melalui perubahan-perubahan yang dilaksanakan.

Selaras dengan visi UNS yaitu “Menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional”, visi FKIP UNS “Menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di bidang keguruan dan pendidikan yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional” diyakini mampu memberi arah FKIP dalam merespons perubahan yang akan terjadi dan menciptakan masa depan melalui perubahan-perubahan yang dilaksanakan.

3.2.1. Isu-Isu Penting yang Berkembang

Berikut ini disusun isu-isu yang berhasil diidentifikasi tentang posisi dan peranan FKIP UNS dalam kancah pendidikan nasional.

a) Perubahan peraturan perundangan pendidikan tinggi dan keuangan pendidikan tinggi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menuntut seluruh institusi pendidikan menjadi subyek hukum dalam bentuk Badan Hukum Pendidikan. Peraturan lainnya yang juga harus diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen, PP 23 tahun 2005 tentang BLU, serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum. Berdasarkan beberapa peraturan tersebut, Renstra Kemenristekdikti memuat tiga sasaran strategis; yaitu [1] meningkatnya relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi; [2] meningkatnya kemampuan iptek dan inovasi; dan [3] terlaksananya reformasi birokrasi.

Kebijakan ini mendorong UNS saat itu untuk bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), untuk meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas layanan dalam rangka peningkatan kemampuan iptek dan inovasi. Regulasi keuangan negara saat ini mengamanatkan pengelolaan keuangan yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Regulasi ini jelas menuntut perubahan dalam UNS untuk mengelola dirinya berbasis *good university governance*. Hal itu juga berimbas pada semua fakultas di UNS, termasuk FKIP, untuk melaksanakan *good university governance*. Saat ini, terdapat dua strategi pengembangan pendidikan yang ditempuh, yaitu: [1] Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Bermutu, Berdaya Saing Internasional, Berkesetaraan Gender dan Relevan dengan Kebudayaan Bangsa dan Negara, dan [2] Penguatan Tata Kelola Sistem Pengendalian Manajemen dan Sistem Pengawasan Internal.

b) Kompetensi dan pergeseran kualifikasi tenaga kerja

Dunia kerja baik sektor pemerintah, swasta, maupun *non-government organization* (NGO), tumbuh makin kompleks, melintas batas negara dan budaya. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja pun bergeser seiring dengan tuntutan pasar. Masyarakat menuntut tenaga kerja profesional berkualitas yang memiliki kemampuan *softskills*.

Selain itu, tenaga kerja berpendidikan setara S-1 dan S-2 semakin banyak dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi kunci.

Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut tenaga terampil bersertifikat profesi atau kompetensi. Pada era MEA ini tenaga terampil yang tidak bersertifikat akan sulit untuk bersaing dengan tenaga terampil bersertifikat dalam mendapatkan pekerjaan, apalagi jika harus bersaing di lapangan kerja di luar negeri. FKIP UNS harus merespons kebutuhan ini dengan menyelenggarakan program pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja di era global ini dan melakukan sertifikasi pada mahasiswa atau lulusannya agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja domestik maupun internasional.

c) Mutu dan globalisasi pendidikan

FKIP UNS perlu memperhatikan kinerja layanannya dan menetapkan standar mutu yang diakui internasional. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan *stakeholders* terhadap layanan prima, serta menghadapi penetrasi gencar dari perguruan tinggi asing, dan upaya konkret LPTK pesaing untuk meningkatkan reputasi mereka.

d) Keadilan sosial

Masyarakat menuntut FKIP UNS untuk lebih peduli dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui program *corporate social responsibility* (CSR).

e) Otonomi daerah

FKIP UNS dituntut menemukan potensi lokalnya untuk diangkat sebagai kekuatan global. FKIP UNS dapat menjadi salah satu motor penggerak di UNS dalam rangka ikut mendukung pengembangan otonomi daerah dengan memberikan kontribusi yang lebih besar.

f) Lingkungan dan dampak ekologis

FKIP UNS dituntut untuk berperanserta bersama fakultas-fakultas lain di UNS dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memperkecil dampak ekologis dengan memberikan kontribusi lewat tri dharma perguruan tinggi.

g) *Open source platform* dalam jaringan sistem informasi

Dengan dikembangkannya *open source platforms*, FKIP UNS memiliki peluang *economics values* yang luas untuk memanfaatkan dan mendayagunakannya dalam rangka manajemen dan transfer pengetahuan di bidang pendidikan calon guru yang efektif dan berkualitas.

3.2.2. Asumsi-Asumsi Dasar

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bisnis FKIP UNS adalah sebagai berikut.

- a) Dengan mengacu pada fungsi UNS untuk memasok pengetahuan dan keterampilan kunci sebagai universitas riset (*research university*), FKIP UNS berfungsi menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang pendidikan
- b) FKIP UNS mendukung UNS untuk mewujudkan misi rencana strategi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- c) Dengan merujuk kebijakan pembiayaan UNS, FKIP UNS dapat membiayai kegiatan operasional dan pengembangan tridharma dan manajemen perguruan tinggi.
- d) FKIP UNS dapat mewujudkan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.

Asumsi tersebut didasarkan pada kondisi sebagai berikut.

- a) Tuntutan kompetensi tenaga kerja lebih tinggi.
- b) Angka partisipasi kasar (APK) nasional pendidikan tinggi mencapai 14,26%, dari prakiraan 25 juta atau 10 % penduduk Indonesia usia 19-24 tahun, dengan target 18%, yang merupakan dampak dari jumlah lulusan SMU/SMK meningkat karena program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah.
- c) Sebagian orang tua menganggap bahwa pendidikan bukan lagi komponen pengeluaran (*cost/expenses*), melainkan investasi untuk peluang taraf hidup lebih baik. Selain itu, sebagian masyarakat memiliki daya beli cukup terhadap pendidikan di perguruan tinggi.
- d) Proyeksi jumlah peminat FKIP UNS yang meningkat, dengan kualitas yang baik melalui seleksi yang ketat, sehingga berimplikasi pada pencitraan publik terhadap kualitas lulusan.
- e) Sebagai LPTK perguruan tinggi negeri, FKIP UNS mendapatkan anggaran pemerintah dengan mekanisme DIPA.
- f) Tambahan anggaran dapat diupayakan melalui PNB, kerja sama, PHK, *block grant*, HAKI, dan sumber lain yang tidak mengikat.
- g) 20% dari APBN dialokasikan untuk anggaran pendidikan nasional.

- h) Status PK-BLU memungkinkan fleksibilitas dan diversifikasi program studi sesuai kebutuhan *stakeholder*.
- i) Lulusan dengan kecakapan akademik dan nonakademik yang lebih tinggi sehingga dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat.

3.2.3 Faktor Penentu Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Bisnis FKIP UNS ini ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut.

- a) Proporsi tenaga pendidik bergelar S-3 sebagai pendorong peningkatan kuantitas dan kualitas riset.
- b) Tenaga kependidikan berkompentensi tinggi.
- c) *Roadmap* penelitian disusun terarah untuk mewujudkan riset unggulan dalam bidang yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, memperhitungkan potensi dan keunggulan UNS, alokasi sumberdaya yang proporsional, menarik minat peneliti, mendorong produktivitas karya ilmu, pengetahuan, teknologi, seni.
- d) Sistem perencanaan berbasis kinerja dengan tata kelola keuangan yang tepat, yang meliputi perhitungan biaya satuan pendidikan, penetapan tarif yang tepat, dan pelaporan yang akuntabel.
- e) Sistem informasi manajemen terpadu.
- f) Sistem informasi pengetahuan bersifat *open source platform* untuk mewujudkan *knowledge based society*.

3.3 Faktor Internal: Kekuatan dan Kelemahan

3.3.1 Modal Intelektual

- a. Mahasiswa FKIP UNS semakin berkualitas sebagai hasil dari semakin baiknya angka keketatan masuk FKIP UNS.
- b. Rasio tenaga pendidik terhadap mahasiswa ideal untuk melakukan proses tridharma maupun manajemen perguruan tinggi. Jumlah tenaga pendidik berpotensi studi lanjut S-3 cukup besar.
- c. Output FKIP UNS berupa produk pengetahuan, teknologi dan seni, dituangkan dalam bentuk publikasi ilmiah, publikasi populer, publikasi buku teks, pameran karya, media pembelajaran, dan lain-lain.

- d. *Softskills* dan *enterpreneurship* lulusan terus ditingkatkan secara berkelanjutan dengan penelusuran bakat minat (tes papikostik bagi seluruh mahasiswa), pembimbingan mahasiswa untuk kegiatan PKM (Program Kreativitas Mahasiswa), dan pengembangan mata kuliah kewirausahaan secara berkelanjutan.
- e. Pola pikir sivitas akademika terhadap pentingnya reputasi internasional perlu ditingkatkan.

3.3.2 Modal Sosial dan Kultural

Kondisi modal sosial dan kultural FKIP UNS dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Modal sosial dan kultural FKIP UNS adalah budaya nasional yang pluralistik. Modal ini dapat digunakan sebagai pijakan untuk pengembangan insan kependidikan. Pluralitas dan heterogenitas kultural ini dapat menjadi sebuah modal budaya, sehingga dapat membntuk pribadi-pribadi lulusan yang siap terjun sebagai guru di berbagai wilayah di Indonesia dengan berbagai tingkatan latar belakang ekonomi peserta didik yang ada.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari UNS, FKIP mendukung penanaman budaya kerja UNS di FKIP yang dikenal dengan UNS ACTIVE (*Achievemnet Orientation, Customer Satisfaction, Teamwork, Integrity, Visionary, dan Enterpreneurship*)

- b. Beberapa tantangan dalam hal budaya yang bersifat struktural juga masih ditemui di lingkungan FKIP UNS. Kondisi ini semakin diperbaiki pelan namun pasti. Kondisi tersebut antara lain.
 - 1) Budaya feodalistik antar pelaku-pelaku organisasi (tenaga pendidik/ mahasiswa, atasan/bawahan) yang dapat menghambat iklim kreativitas, kebebasan akademis ataupun komunikasi;
 - 2) Relasi yang cenderung bersifat eksklusif, yaitu kecenderungan terbentuknya kelompok-kelompok kecil (studi atau riset), sehingga sulit tercipta sebuah sinergi;
 - 3) Relasi yang kurang apresiatif, yaitu belum optimalnya apresiasi terhadap karya atau prestasi-prestasi sesama insan FKIP UNS;
 - 4) Komunikasi antar pelaku-pelaku organisasi tidak lancar, sehingga menghambat berbagai alur informasi dan pengetahuan;
 - 5) Relasi yang kurang partisipatif, yaitu belum tingginya partisipasi kalangan 'akar rumput' dalam perkembangan dan kebijakan umum FKIP UNS.

3.3.3 Modal Organisasi, Sistem Manajemen, dan Layanan

- a. Layanan dasar tridharma telah mampu dipenuhi oleh FKIP UNS meskipun efektivitas dan efisiensinya tetap harus ditingkatkan. Ini berakibat pada nilai akreditasi berbagai program studi di FKIP UNS. Saat ini, sebanyak 18 dari 23 program studi S-1, 6 dari 17 program studi S-2, dan 1 dari 5 program studi S-3 sudah terakreditasi A, sedangkan sisanya terakreditasi B.
- b. FKIP UNS saat ini merupakan salah satu FKIP terbesar dibandingkan dengan FKIP-FKIP di perguruan tinggi lain. Bahkan, saat ini FKIP UNS dijadikan rujukan seluruh FKIP di Indonesia dalam mengembangkan institusi, manajemen, implementasi ICT dan lain-lain.
- c. Telah dikembangkan perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan sistem manajemen dalam rangka melakukan akselerasi pengembangan FKIP UNS meskipun masih perlu pembenahan dalam berbagai hal.
- d. FKIP UNS mampu mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel dan menjadi fakultas dengan daya serap anggaran tinggi.
- e. Tenaga pendidik belum secara optimal berorientasi riset dan pelaku manajemen seringkali kurang cepat tanggap terhadap perubahan zaman serta arah pengembangan diri dan organisasi.

3.3.4 Modal Keuangan

- a. Pembiayaan operasional dan pengembangan FKIP UNS bersumber dari rupiah murni (RM), BOPTN, dan PNBPN serta sumber lain yang tidak mengikat. Besarnya PNBPN sebanding dengan jumlah mahasiswa yang masuk ke FKIP UNS. Dengan jumlah mahasiswa terbesar dibandingkan dengan fakultas lain di UNS, FKIP mempunyai modal keuangan yang cukup besar. Dana ini digunakan untuk pengembangan fakultas dengan penganggaran berbasis kinerja.
- b. FKIP UNS mempunyai kemampuan mengembangkan unit bisnis, namun belum memaksimalkan aspek usaha bisnis mandiri.
- c. Potensi FKIP UNS dalam penggalangan dana (*fund raising*) sebagian besar bersumber dari dana masyarakat. Potensi ini perlu digali secara lebih mendalam, mengenali permasalahannya dan mengembangkan upaya penggalangan dana yang akuntabel. Namun, kapabilitas dalam menggalang dana masih terbatas.

3.3.5 Modal Sumber Daya Fisik

- a. Luas lahan kampus FKIP UNS sangat memadai. Kampus FKIP tersebar di enam lokasi yang terpisah, yaitu Kampus Ketingan, Kleco, Manahan, Ngoresan, Pabelan, dan Kebumen. Hal ini menjadikan FKIP UNS lebih fleksibel dalam merencanakan pengembangan. Ruangan yang tersedia pada umumnya telah memadai dengan tingkat pemanfaatan yang cukup tinggi. Namun ruang residensi tenaga pendidik dan mahasiswa peneliti serta laboratorium beserta fasilitasnya masih terbatas.
- b. Aset dan sumber daya fisik dasar sudah cukup memadai. Jumlah aset yang memadai memungkinkan operasi pendidikan berjalan baik sekalipun pemutakhiran peralatan untuk pendidikan dan riset masih minim untuk menghasilkan produk yang berkualifikasi tinggi. Masih terjadi kerancuan antara fungsi laboratorium pengajaran dengan fungsi laboratorium penelitian bahkan dengan fungsi administratif. Namun, perlahan tetapi pasti FKIP UNS makin berbenah dengan melengkapi kebutuhan peralatan yang lebih memadai, memisahkan berbagai fungsi peralatan, peremajaan peralatan, dan penjadwalan *maintenance* untuk menjamin peralatan tetap berfungsi dengan baik.
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai ruang publik dan ruangan bersama untuk mahasiswa berkegiatan di antara jadwal kuliah sudah ada, namun masih harus ditingkatkan. Pada umumnya mahasiswa mempergunakan selasar, taman, dan halaman parkir untuk kegiatan kemahasiswaan. Bahkan saat ini, hampir di semua titik kampus FKIP UNS telah dilengkapi dengan zona *hot spot* yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa untuk akses internet.
- d. Daya dukung dan keandalan (reliabilitas) utilitas listrik dan air bersih serta instalasi pengolah limbah perlu ditingkatkan, terutama untuk ruang-ruang laboratorium dan ruang fungsional. Berbagai ruang dan fasilitas listrik yang tidak berfungsi dengan baik masih harus dibenahi.
- e. Fasilitas TIK pada dasarnya telah terpenuhi, modul *e-learning* telah dikembangkan, *access point* telah tersedia, perpustakaan digital dan sistem informasi manajemen juga sudah tersedia. Kapasitas *bandwith* FKIP juga cukup besar untuk kepentingan dosen dan mahasiswa. Akan tetapi, keandalan koneksi masih perlu ditingkatkan. *Backbone* antargedung dan lokasi kampus FKIP dengan *fiber-optic* juga sudah disiapkan, baik di area kampus Ketingan maupun kampus di luar

Kentingan. Prasarana dan sarana komputer untuk layanan mahasiswa perlu ditingkatkan dengan menambah anjungan internet bagi mahasiswa.

3.4 Faktor Eksternal: Peluang dan Tantangan

3.4.1 Kebijakan Politik, Hukum, dan Peraturan

- a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas memberikan peluang untuk mengelola UNS secara mandiri. Kebijakan pembangunan pendidikan nasional dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, berupa misi Kemendiknas meliputi Ketersediaan, Keterjangkauan, Mutu dan Relevansi, Kesetaraan, dan Kepastian/Keterjaminan (5K). Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah diversifikasi program studi diploma, sarjana, dan pascasarjana untuk menampung minat calon mahasiswa dan memperluas akses, penguatan mutu pendidikan, peningkatan *good university governance*.
- b. Kebijakan pemerintah yang memberi peluang PTN mengelola keuangan melalui PK BLU, memberi peluang UNS untuk meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders* secara optimal dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini dimanfaatkan secara maksimal oleh FKIP UNS untuk member kebebasan kepada masing-masing prodi untuk merencanakan Rencana Bisnis dan Anggaran masing-masing sesuai dengan kebutuhan Prodi yang bersangkutan sehingga program pengembangan Prodi lebih bisa dimaksimalkan.
- c. Pemerintah melakukan desentralisasi kebijakan. Melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana anggaran untuk sektor pendidikan. Reformasi bidang politik ini menjadi peluang bagi UNS untuk menggali kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun pendidikan tinggi. FKIP UNS menangkap peluang ini dengan mengembangkan program kerja sama dengan beberapa pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program Sarjana S-1 Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ).
- d. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU no 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP No. 19/2005

tentang Standar Nasional Pendidikan adalah perundang-undangan yang memberikan peluang bagi FKIP UNS untuk pengembangan dirinya.

3.4.2 Prospek Ekonomi

- a. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan tinggi yang kuat merupakan captive market bagi FKIP UNS. Walaupun terdapat imbas krisis ekonomi, minat calon mahasiswa, daya beli dan motivasi orang tua untuk mendorong anaknya kuliah di FKIP UNS masih tinggi terutama seiring dengan program sertifikasi guru yang masih terus bergulir hingga saat ini.
- b. Pada umumnya calon mahasiswa dan orang tua selektif memilih Perguruan Tinggi. Mutu dan layanan telah menjadi aspek pertimbangan. Oleh karena itu, FKIP UNS harus meningkatkan kinerja. Calon mahasiswa yang belum diterima di perguruan tinggi negeri, banyak yang memilih ikut seleksi pada tahun berikutnya atau mencari kerja, bukan memaksakan diri melanjutkan studi di perguruan tinggi yang diragukan kualitasnya.

3.4.3 Situasi Sosial – Kultural

- a. Jumlah peminat FKIP UNS yang tinggi merupakan peluang UNS untuk melakukan seleksi memperoleh calon yang berkualitas. Selain itu, kemampuan menyediakan dana pendidikan, motivasi, dan urutan pilihan masuk (pertama atau kedua) juga cenderung lebih baik.
- b. Perangkat standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi yang tersedia merupakan peluang bagi FKIP UNS untuk mengembangkan diri sehingga semakin bermutu, akuntabel, dan menghasilkan lulusan yang memenuhi atau melampaui standar minimum yang dipersyaratkan dunia bisnis dan masyarakat. Namun demikian, kondisi ini dapat menjadi tantangan bagi FKIP UNS untuk semakin peduli dan bertanggung jawab secara sosial pada masyarakat.
- c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia yang semakin kompleks dan interdependen, permasalahan besar yang dihadapi oleh umat manusia haruslah diselesaikan dalam pola jejaring kerja sama yang saling menguntungkan. Kesadaran ini akan semakin menguatkan pola kerja sama yang selama ini dilaksanakan FKIP UNS. Kerja sama dalam bidang pendidikan, riset, maupun pengabdian pada masyarakat perlu semakin dipacu dengan pola yang lebih terpadu.

- d. FKIP UNS memiliki peluang untuk mengembangkan jejaring dengan alumni, industri, pemerintah, universitas dan institusi lain di luar negeri dalam rangka penyediaan beasiswa, kolaborasi riset, dan investasi.

3.4.3 Kemajuan Teknologi

- a. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan peluang bagi FKIP UNS untuk pengembangan diri. Jejaring sosial, *open source platform*, *e-learning* dengan *distance learning management system*, *internet working*, *knowledge management system* merupakan potensi penting yang perlu didayagunakan FKIP UNS. TIK telah mampu mempercepat, mempermudah, meningkatkan akurasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran serta pengelolaan perguruan tinggi untuk promosi, branding, maupun pemberdayaan masyarakat.
- b. Pemanfaatan IPTEK oleh perguruan tinggi dan fakultas lain sudah sangat berkembang, jika FKIP UNS gagal menyediakan fasilitas TIK (penyediaan *hot spots*, *e-learning*, *e-library*) dan teknologi lain bagi kemudahan proses pembelajaran dan pelayanannya, maka FKIP UNS akan tertinggal dibanding dengan perguruan tinggi dan fakultas lain.
- c. Pemanfaatan TIK, terutama dengan *open source platform* dan teknologi lainnya merupakan peluang bagi FKIP UNS untuk mengembangkan pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) dan pembelajaran campuran (*blended learning*).
- d. Meningkatnya promosi dan *branding* yang agresif serta meningkatnya reputasi LPTK kompetitor di Indonesia merupakan ancaman bagi FKIP UNS.

3.5 Analisis SWOT Penentuan Posisi FKIP UNS

Secara umum dalam melakukan analisis *SWOT*, ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Tim renstra dapat memilih satu di antara keduanya atau menggabungkan keduanya. Pada bab ini, analisis *SWOT* disajikan dalam bentuk penggabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Untuk mengetahui posisi FKIP UNS saat ini dan memperlancar implementasi strategi, digunakan metode analisis *SWOT*. Setiap faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman/tantangan diberi skor yang dikalikan dengan bobot berdasarkan tingkat

kepentingan dan pengaruh faktor tersebut terhadap kinerja FKIP UNS. Jumlah seluruh nilai tersebut akan menjadi indeks posisi FKIP UNS dalam kuadran strategis, dengan nilai koordinat yang diperoleh dari nilai kekuatan dikurangi nilai kelemahan, dan nilai peluang dikurangi nilai ancaman/tantangan.

Tabel 3.1 menunjukkan skor aspek kekuatan FKIP UNS, dan Tabel 3.2 menunjukkan skor aspek kelemahan. Faktor eksternal yang terdiri dari aspek peluang dan aspek ancaman/tantangan dideskripsikan pada tabel 3.3 dan tabel 3.4.

Tabel 3.1 Analisis Kekuatan (*Strength*) di FKIP UNS

No.	Uraian	Bobot	Rating	Skor
		a	b	a x b
Modal Intelektual dan Sumberdaya Manusia				
1	Kualitas input mahasiswa yang tinggi	0.1	4	0.4
2	Kualitas dosen yang meningkat cepat	0.1	4	0.4
3	Rasio dosen dengan mahasiswa yang ideal	0.08	4	0.32
4	Meningkatnya karya dan produk ilmiah dosen dan mahasiswa	0.05	3	0.15
5	Meningkatnya iklim persaingan akademis serta produktivitas penelitian	0.08	2	0.16
Modal Sosial dan Kultural				
6	Kearifan lokal sangat mendukung pencapaian visi Fakultas	0.08	4	0.32
7	Iklim kehidupan kampus yang kondusif	0.05	4	0.2
Kinerja Layanan dan Sistem Manajemen				
8	Layanan dasar tridharma telah mampu dipenuhi	0.05	4	0.2
9	Program studi yang dimiliki telah terakreditasi	0.1	4	0.4
10	Banyak dikembangkan program pendidikan baru	0.06	3	0.18
11	Telah dikembangkan perangkat organisasi sesuai tuntutan jaman	0.05	3	0.15
Kinerja Keuangan				
12	Daya serap sumber dana yang direncanakan termasuk baik	0.05	3	0.15
13	Kemampuan untuk mengembangkan unit bisnis	0.05	3	0.15
Kinerja Sumber Daya Fisik				
14	Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif bagi proses pendidikan untuk proses pendidikan, riset dan manajemen	0.05	3	0.15
15	Layanan berbasis TIK telah diterapkan	0.05	4	0.2
Jumlah analisis kekuatan		1		3.53

Tabel 3.2 Analisis Kelemahan (*Weakness*) di FKIP UNS

No.	Uraian	Bobot	Nilai	Skor
		a	b	a x b
Kinerja Sumber Daya Manusia/Modal Intelektual				
1	Masih terdapat dosen bergelar S1	0.1	3	0.3
2	Kebijakan dan program P2M di FKIP UNS lebih bersifat reaktif terhadap permintaan sesaat	0.07	3	0.21
3	Komitmen SDM FKIP UNS pada kegiatan riset masih kurang	0.03	4	0.12
4	<i>Soft skills & entrepreneurship</i> lulusan masih kurang	0.1	3	0.3
Kinerja Organisasi dan Modal Budaya				
5	Budaya kerja pelaku organisasi masih lemah	0.02	3	0.06
6	Budaya kerja berbasis Relasi antar sivitas akademika	0.03	2	0.06
Kinerja Layanan dan Sistem Manajemen				
7	Promosi & informasi tentang FKIP UNS untuk program pendidikan masih kurang	0.1	3	0.3
8	Pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat masih kurang	0.1	3	0.3
9	Sistem karier SDM akademik belum terintegrasi	0.05	3	0.1
10	Kemampuan membaca tanda-tanda per-ubahan zaman dan kesadaran tentang pengembangan diri dan organisasi masih kurang	0.03	2	0.06
Kinerja Keuangan				
11	Keterbatasan dana (investasi & riset);	0.07	3	0.21
12	Struktur penganggaran dan manajemen finansial belum terdistribusi merata	0.02	3	0.06
13	Kapabilitas dalam menggalang dana kurang: Tenaga akademik kompeten menjalankan bisnis	0.1	3	0.3
Kinerja Sumber Daya Fisik				
14	Pemutakhiran dan perawatan peralatan pendidikan dan riset masih kurang	0.1	4	0.4
15	Kapasitas TIK belum memadai;	0.08	2	0.16
Jumlah analisis kelemahan		1		2.99

Tabel 3.3 Analisis Peluang (*Opportunity*) di FKIP UNS

No.	Uraian	Bobot	Nilai	Skor
		a	b	a x b
Kebijakan Politik - Hukum - Peraturan				
1	Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan daya saing bangsa.	0.1	4	0.4
2	Kebijakan pemerintah mendukung institusi pendidikan sangat besar	0.1	4	0.4
3	Kebutuhan pasar sektor pendidikan sangat terbuka	0.1	4	0.4
4	Dukungan pemerintah untuk menjadi PT berbadan hukum	0.08	4	0.32
Ekonomi				
5	Kebijakan pemerintah mengalokasikan dana pendidikan cukup besar	0.07	3	0.21
6	Terbuka kerja sama dan kolaborasi dengan industri, pemerintah, universitas luar negeri, dan insititusi luar negeri.	0.05	4	0.2
7	Mendapatkan dana riset dan pendidikan;	0.08	3	0.24
Sosial - Kultural				
8	Jumlah peminat pendidikan FKIP UNS (S-1, S-2, S-3) tinggi (termasuk <i>twining-program</i>);	0.07	3	0.21
9	Jumlah dan potensi alumni sebagai jejaring FKIP UNS (<i>beasiswa, endowment, kolaborasi riset, invenstasi</i>);	0.05	3	0.15
10	Ada peminat mahasiswa asing;	0.05	2	0.1
11	Kepercayaan masyarakat terhadap FKIP yang tinggi	0.1	4	0.4
Teknologi				
12	Pemanfaatan sistem jaringan, teknologi informasi dan komunikasi, terutama dengan <i>open source platform</i> .	0.05	4	0.2
13	Penggunaan teknologi untuk <i>distance learning</i> dan <i>blended learning</i>	0.05	4	0.2
14	Media publikasi	0.05	3	0.15
Jumlah analisis peluang		1		3.58

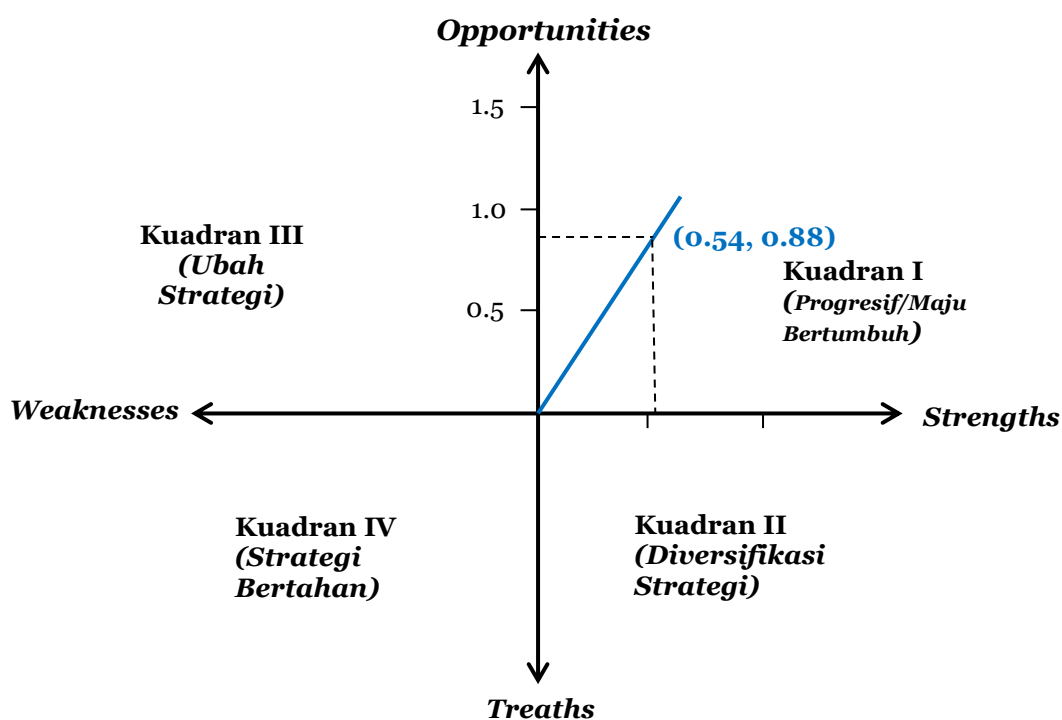
Tabel 3.4 Analisis Ancaman (*Threath*) di FKIP UNS

No.	Uraian	Bobot	Nilai	Scor
		a	b	a x b
Kebijakan Politik - Hukum - Peraturan				
1	Tuntutan ketaatan terhadap aturan tata kelola universitas sangat tinggi.	0.15	2	0.3
2	Masa studi mahasiswa dituntut semakin pendek	0.1	3	0.3

3	Perguruan tinggi asing dapat masuk di wilayah Surakarta	0.1	2	0.2
Ekonomi				
4	Kepastian jumlah dan pola pendanaan pemerintah untuk sektor pendidikan tinggi belum jelas (minimnya dana pemerintah)	0,1	4	0.4
5	Pemerintah mewajibkan UNS untuk menerima mahasiswa yang tergolong tidak mampu melalui bidik misi	0.1	3	0.3
6	Kegiatan yang dijalankan penganggaran belum sepenuhnya berbasis kegiatan	0.1	3	0.3
Sosial - Kultural				
7	Tuntutan mutu, kompetensi, dan relevansi lulusan yang tinggi.	0.1	3	0.3
8	Tantangan promosi dan branding yang agresif dari universitas pesaing (swasta nasional); Reputasi beberapa PTN dan PTS di Indonesia meningkat.	0.07	2	0.14
9	Penetrasi dari perguruan tinggi luar negeri dengan tawaran beasiswa (mengurangi pasar FKIP UNS);	0.1	2	0.2
10	Tantangan kepedulian dan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup.	0.08	2	0.16
Teknologi				
11	Tuntutan kemajuan TIK yang cepat	0.1	1	0.1
Jumlah analisis tantangan		1		2.7

Tabel 4.5. Rangkuman hasil Analisis SWOT FKIP UNS

Deskripsi		Nilai	Indeks Posisi
Analisis Faktor Internal	Kekuatan FKIP	3.53	
	Kelemahan FKIP	2.99	
Kekuatan - Kelemahan			0.54
Analisis Faktor Eksternal	Peluang FKIP	3.58	
	Ancaman/Tantangan FKIP	2.7	
Peluang - Ancaman			0.88
Ploting Posisi Kuadran (Internal (sumbu x), Eksternal (sumbu y))			(0.54, 0.88)



Gambar 4.2 Posisi FKIP UNS setelah dilakukan analisis SWOT kuantitatif (sumber: data diolah)

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa posisi FKIP berada pada kuadran I (positif, positif), hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, FKIP dalam kondisi kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah **progresif dan ekspansif**, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan, dan meraih peluang secara maksimal demi kemajuan yang berkelanjutan.

Analisis Kuadran: berdasarkan besarnya angka dalam kuadran terdapat catatan yang harus diperhatikan oleh Tim atau Penentu Kebijakan, yaitu bahwa faktor eksternal (peluang) lebih besar daripada faktor internal (kekuatan). Hal ini mengandung makna bahwa secara umum, dari sisi faktor eksternal FKIP memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan dengan tantangan/ancaman yang ada. Sementara itu, dari sisi faktor internal FKIP UNS memiliki kekuatan lebih dimiliki dari pada kelemahan. Berdasarkan angka yang ada pada kuadran I terlihat bahwa sebenarnya FKIP UNS sangat berpeluang, namun kekuatan yang dimiliki belum sebanding dengan peluang yang ada. Dengan demikian, strategi yang disarankan adalah FKIP UNS harus memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kekuatan agar peluang pasar yang dimiliki dapat diraih semaksimal mungkin.

Untuk angka peluang diperoleh 0,88, ini berarti sebenarnya FKIP memiliki peluang yang sangat bagus. Hal ini sungguh sangat menguntungkan bagi lembaga karena peluang itu sangat dipengaruhi oleh situasi eksternal. Dalam hal ini peluang pasar telah tercipta. Dunia kerja sangat terbuka untuk lulusan dan kondisi ini sangat menjanjikan. Namun dengan angka kekuatan sebesar 0,54 maka FKIP harus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kekuatan untuk meraih sebesar-besarnya peluang yang ada.

BAB IV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Visi, Misi, dan Tujuan

4.1.1 Visi FKIP Universitas Sebelas Maret

Berdasarkan Keputusan Dekan FKIP UNS Nomor 023/UN27.02/HK/2016 tertanggal 20 Januari 2016, tentang Falsafat, Visi, dan Tujuan FKIP UNS, visi FKIP UNS adalah:

"Menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di bidang keguruan dan ilmu pendidikan bereputasi internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional".

Jabaran visi diuraikan dalam 3 (tiga) perspektif sebagai definisi operasional sebagai berikut.

- (1) Sebagai pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di bidang keguruan dan ilmu pendidikan, FKIP UNS menjadi pusat pembaruan (*center of excellences*) dalam kerangka sebagai berikut:
 - a. Pengembangan ilmu terbaru untuk menyelesaikan persoalan peradaban bangsa dan umat manusia,
 - b. Pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, memberikan manfaat dan kemaslahatan masyarakat untuk memajukan peradaban bangsa dan kesejahteraan umat manusia, dan
 - c. Pengembangan seni kreatif sebagai aktualisasi keberadaban bangsa yang menyeimbangkan antara nalar dan kemanusiaan untuk mewujudkan kehidupan harmonis.
- (2) Bereputasi internasional
FKIP UNS menyiapkan diri sebagai agen kemajuan dalam bidang keguruan dan ilmu pendidikan dan turut serta mengantarkan masyarakat bangsa yang bermartabat dalam kancah pergaulan internasional.
- (3) Nilai-nilai luhur budaya bangsa
FKIP UNS berpegang teguh pada nilai luhur budaya bangsa sebagai semangat penatalaksanaan tridharma sekaligus mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam membentuk karakter lulusan.

4.1.2 Misi FKIP Universitas Sebelas Maret

Rumusan misi FKIP UNS adalah:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif berdasarkan perkembangan mutakhir di bidang keguruan dan ilmu pendidikan.
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan temuan baru di bidang keguruan dan ilmu pendidikan, dan
- 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keguruan dan ilmu pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

4.1.3 Tujuan FKIP Universitas Sebelas Maret

Penetapan visi dan misi FKIP UNS ditujukan untuk:

- 1) Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian luhur, cerdas, dan terampil yang siap menjadi pendidik atau tenaga kependidikan profesional yang berwawasan global;
- 2) Menghasilkan inovasi baru di bidang keguruan dan ilmu pendidikan sebagai landasan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat dan untuk membangun kehidupan yang lebih baik; dan
- 3) Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu memecahkan persoalan praktis di bidang keguruan dan ilmu pendidikan

4.2 Visi dan Misi Rencana Strategis Bisnis (RSB) FKIP UNS 2019—2023

Visi RSB FKIP UNS Tahun 2019—2023 adalah “*Instalasi dan Pelembagaan PTNBH*”. Penekanan visi ini tidak terlepas dari strategi untuk keberlanjutan rencana strategis bisnis sebelumnya (RSB FKIP UNS Tahun 2015—2019 yang diperbaharui dengan RSB FKIP UNS Percepatan Tahun 2017—2019) yaitu “Akselerasi Peraihan Reputasi FKIP UNS sebagai *World Class Faculty*”. Visi ini masih sejalan dengan visi besar FKIP UNS menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan bereputasi internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional” atau dikenal dengan “FKIP UNS unggul di dunia” pada 2025.

4.3 Arah Kebijakan, Prioritas, dan Program RSB FKIP UNS 2019—2023

Arah kebijakan yang dikembangkan FKIP UNS difokuskan untuk mendukung kebijakan universitas dengan dimulainya tata kelola UNS sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTNBH) dalam rangka akselerasi pencapaian reputasi internasional. Program dan kegiatan yang direncanakan terutama mengacu pada **RPJM UNS, RPJM**

Nasional Periode III dan Periode IV serta **Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**. Selain itu, prioritas program dan kegiatan juga diselaraskan dengan standar yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja dengan Menristekdikti, Kontrak Kinerja Rektor, Kontrak Kinerja Dekan, Standar Akreditasi **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)**, dan beberapa kriteria pemeringkatan perguruan tinggi seperti **Klasterisasi Perguruan Tinggi** oleh Kemenristekdikti, **QS STARS, QS AUR/WUR, Times Higher Education (THE) Ranking, UI Greenmetrics, Webometrics, 4icu.org**.

Jenis kegiatan dan target keberhasilan juga didasari dengan analisis SWOT dan usaha menjamin keberlanjutan kebijakan, sasaran strategis, program unggulan, dan kegiatan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya.

Target pencapaian rencana strategis adalah terpenuhinya **lima Sasaran Strategis yaitu**: Akselerasi Profesionalisme dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia; Akselerasi Riset, Publikasi dan Inovasi; Akselerasi Reorientasi Pembelajaran Berbasis 4.0; Akselerasi Pengembangan Institusi, Penguatan Literasi Data dan Teknologi (ICT); Optimalisasi Hukum, Birokrasi dan Kerjasama. Kelima sasaran strategis tersebut diukur dari pencapaian *Indikator Kinerja Utama/Key Performance Indicators (KPI)* pada akhir tahun 2023.

Periode Tahun 2019—2023 merupakan periode awal penyelenggaraan tata kelola UNS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Oleh karena itu, tiga tahun pertama (2019—2021) merupakan tahap **instalasi dan transisi PTNBH**, sedangkan dua tahun berikutnya (2022—2023) merupakan tahap **pencapaian reputasi UNS** sebagai *World-Class University*, yaitu tercapainya reputasi sebagai perguruan tinggi unggul di kawasan Asia dan Pasifik. Secara ringkas, pentahapan ini disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Tahapan RSB 2019-2023

Selanjutnya, prioritas program yang dikembangkan untuk dijalankan pada periode 2019—2023 mengacu pada lima sasaran strategis dengan skala prioritas, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Program Prioritas Tahun 2019—2023

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	2019	2020	2021	2022	2023
Akselerasi Profesionalitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik	++	++	++	+	+
	Penguatan dan pengembangan tenaga kependidikan	++	++	++	+	+
	Peningkatan daya saing mahasiswa dalam kompetisi nasional maupun internasional	++	++	++	++	++
	Sertifikasi kompetensi/profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	++	++	++	+	+
	Penyempurnaan sistem remunerasi	++	++	+	+	+
Akselerasi Riset, Publikasi dan Inovasi	Penyempurnaan sistem tata kelola riset untuk peningkatan produk dan mutu	++	++	++	++	++
	Peningkatan kapabilitas peraih HaKI/Paten.	++	++	++	++	+

	Hilirisasi produk riset untuk kebutuhan industri	++	++	++	++	++
	Pemberdayaan GB untuk pengembangan riset kolaborasi (internasional)	++	++	++	++	++
	Peningkatan kualitas publikasi melalui riset mahasiswa S1/S2/S3	++	++	++	++	++
Akselerasi Reorientasi Pembelajaran Berbasis 4.0	Rekonstruksi kurikulum sesuai paradigma <i>Outcome-Based Education (OBE)</i> dan memenuhi kebutuhan industri saat ini dan yang akan datang	++	++	++	++	++
	Peningkatan aktivitas <i>Blended Learning</i> dan sistem pembelajaran berbasis riset	++	++	++	++	++
	Peningkatan kualitas lulusan melalui penguatan <i>softskills</i> dan sertifikasi kompetensi	++	++	++	++	++
	Perluasan akses pendidikan dengan membuka Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU)	++	++	++	+	+
Akselerasi Pengembangan Institusi, Penguatan Literasi Data & Teknologi (ICT)	Instalasi & Pelembagaan PTNBH	++	++	++	+	+
	Integrasi sistem informasi informasi untuk pengembangan <i>valid big data</i> .	++	++	+	+	+
	Penguatan penjaminan mutu untuk meningkatkan jumlah program studi terakreditasi unggul (A:80%. B: 20%) dan akreditasi/sertifikasi internasional	++	++	++	+	+
	Penguatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan vokasi	++	++	++	++	++

	Peningkatan kualitas layanan dan akreditasi Rumah Sakit Pendidikan UNS	++	++	++	++	++
Optimalisasi Hukum, Birokrasi dan Kerjasama	Penyempurnaan kebijakan, peraturan dan dasar hukum lainnya sebagai landasan operasional <i>Good University Governance</i>	++	++	++	++	++
	Operasionalisasi Badan Pengelola Usaha untuk meningkatkan pendapatan non-UKT	++	++	++	++	++
	Pencapaian reputasi internasional	+	++	++	++	++

Renstra Strategi Bisnis FKIP UNS 2019—2023 ini merupakan titik awal penting karena pada periode ini Renstra Bisnis FKIP UNS menampilkan diri sebagai fakultas yang memacu *Instalasi dan Pelembagaan UNS sebagai PTNBH*. Pada tahap ini, program dan kegiatan FKIP UNS mengarah pada instalasi sistem tata kelola PTNBH, yaitu penerapan *Good Faculty Governance* (GFG); peningkatan otonomi dan kemandirian fakultas; dan penyelenggaraan internasionalisasi berbasis kearifan lokal.

Setidaknya ada lima tantangan utama yang harus diselesaikan dalam periode 2019—2023 yakni antara lain; sistem integrasi data; jumlah dosen kualifikasi doktor; jumlah staf profesional; akreditasi program studi; pengelolaan unit usaha penghasil pendapatan (*Revenue Generating Unit*).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 142/M/KPT/2019, keberhasilan program-program tersebut akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)/Key Performance Indicators (KPI) 2019—2023

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE (2018)	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
Pilar 1: Akselerasi Profesionalitas & Kesejahteraan SDM								
1	Jumlah prestasi mahasiswa	prestasi						
	a. Jumlah Prestasi Mahasiswa Tingkat Nasional (Diselenggarakan DIKTI)	prestasi	0	5	10	12	15	18
	b. Jumlah Prestasi Mahasiswa Tingkat Nasional (Mandiri)	prestasi	10	12	15	17	19	20
	c. Jumlah Prestasi Mahasiswa Tingkat Nasional	prestasi	15	20	30	35	40	45
	d. Jumlah Prestasi Mahasiswa Tingkat Internasional	prestasi	3	4	5	6	7	8
2	Persentase dosen bergelar S-3	persen	37,3	40	44	46	48	50
3	Persentase Dosen Bergelar Lektor Kepala	persen	22,4	22,45	22,58	24	25	26
4	Persentase Dosen Bergelar Guru Besar	persen	8,31	8,5	9	9,5	10	10,5
Pilar 2: Akselerasi Riset, Publikasi dan Inovasi (AKADEMIK)								
5	Jumlah Pusat Unggulan IPTEK (<i>Center of Excellence</i> bereputasi internasional)	Unit	0	1	1	1	1	1
6	Jumlah publikasi internasional terindeks Scopus							
	a. Jumlah publikasi di jurnal internasional terindeks SCOPUS	Judul	88	131	150	160	175	200
	b. Jumlah pulikasi di prosidings terindeks Scopus	Judul	226	336	345	360	375	400
7	Jumlah HAKI atau Paten yang didaftarkan	Jenis	33	55	70	85	100	120
8	Jumlah Prototipe <i>Research & Development</i>	Jenis	2	5	7	8	9	10
9	Jumlah Prototipe Industri	Jenis	0	1	2	3	4	5
10	Jumlah Sitasi	sitasi	550	748	1200	1500	1800	2000
11	Jumlah Jurnal Bereputasi Nasional	Judul	3	5	10	12	14	16
12	Jumlah Jurnal Bereputasi Global	Judul	0	1	2	3	4	5
13	Jumlah produk inovasi UNS	Judul	4	6	8	10	12	14

Pilar 3: Akselerasi Reorientasi Pembelajaran Berbasis 4.0 (MAWA)								
14	Jumlah Mahasiswa berwirausaha	orang	14	31	75	90	100	120
15	Persentase lulusan mendapatkan pekerjaan pertama dalam waktu 6 bulan	persen	85	86	87	88	89	90
Pilar 4: Akselerasi Pengembangan Institusi, Penguatan Literasi Data & Teknologi (ICT)								
16	Persentase Lulusan Bersertifikasi kompetensi dan profesi	persen	35	36	37	38	39	40
17	Persentase Program Studi Terakreditasi A	persen	47%	51%	56%	58%	60%	62%
18	Peringkat Perguruan Tinggi Nasional	Prkt	17	12	10	10	9	9
19	Akreditasi Institusi	Akrd.	A	A	A	A	A	A
Pilar 5: Optimalisasi Hukum, Birokrasi dan Kerja Sama								
20	Opini auditor eksternal	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
21	Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Persentase kuantitas tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran strategis yang diwujudkan dalam program utama tersebut selanjutnya dirinci menjadi 32 jenis kegiatan yang masing-masing dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) atau *Activity Performance Indicators (API)*. Kegiatan dan IKK tersebut disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Sasaran Strategis 1: Akselerasi Profesionalitas & Kesejahteraan SDM

KEGIATAN & INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Satuan	Base-line	TARGET				
K-01	Peningkatan Kuantitas & Kualitas Tenaga Pendidik			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Dosen : Mahasiswa	Rasio	1 : 25	1 : 26	1 : 27	1 : 28	1 : 29	1 : 30
2	Persentase dosen bergelar S3	%	37,3	40	44	46	48	50
3	Persentase dosen bergelar Guru Besar	%	8,31	8,5	9	9,5	10	10,5
4	Persentase dosen bergelar Lektor Kepala	%	22,4	22,45	22,58	24	25	26
5	Jumlah dosen mengikuti post-doctoral program	Orang	1	1	2	3	4	5
6	Jumlah dosen yang ditugaskan di PT lain di Indonesia	Orang	1	1	1	1	1	1
7	Jumlah dosen yang aktif di asosiasi profesi	Orang	300	310	320	330	340	350
8	Jumlah dosen yang memiliki sertifikat profesi atau sertifikat kompetensi	Orang	310	315	320	325	335	345
K-02 Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kependidikan UNS								
1	Jumlah prestasi nasional yang diraih tenaga kependidikan	Prestasi	0	1	1	1	1	1
2	Persentase tenaga kependidikan fungsional tertentu	%	1,5%	1,5%	5,4%	6,2%	6,9%	7,7%
3	Persentase tenaga kependidikan bergelar S2	%	6%	5,67%	6,1%	6,20%	6,30%	6,40%
4	Jumlah tenaga kependidikan mengikuti program pelatihan	Orang	25	25	26	26	27	27
5	Persentase tenaga kependidikan bersertifikat profesi atau bersertifikat kompetensi	%	4%	4,6%	5,4%	6,2%	6,9%	7,7%
6	Jumlah tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sertifikasi profesi	Orang	0	1	1	2	2	3
7	Jumlah tendik yang ditugaskan di PT/ Instansi lain di Indonesia	Orang	0	0	0	0	0	0

K-03	Penguatan SDM Berwawasan Internasional							
1	Global Readiness Index Dosen	Skala 1-4	3,15	3,2	3,25	3,3	3,35	3,4
2	Global Readiness Index Tenaga Kependidikan	Skala 1-4	3,07	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3
3	Global Readiness Index Mahasiswa	Skala 1-4	3,15	3,2	3,25	3,3	3,35	3,4
4	Jumlah dosen menjadi visiting scholar (mengajar) di PT luar negeri	Orang	5	8	9	10	11	12
5	Jumlah Mahasiswa FKIP UNS yang berpartisipasi di kegiatan ilmiah atau pelatihan internasional	Orang	14	16	40	50	60	70
6	Jumlah dosen berprestasi atau mendapatkan penghargaan internasional	Orang	0	2	3	4	5	6
7	Jumlah Mahasiswa FKIP UNS peserta program student exchange	Orang	33	40	45	50	55	60
K-04	Penegakan Disiplin Sivitas Akademika							
1	Jumlah pelanggaran disiplin & etika akademik & non akademik	Kasus	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah kasus hukum yang dialami Sivitas Akademika	Kasus	0	0	0	0	0	0
K-05	Peningkatan Kualitas Prestasi Mahasiswa							
1	Jumlah Prestasi Mahasiswa Tingkat Nasional (Diselenggarakan DIKTI)	Prestasi	0	5	10	12	15	18
2	Jumlah Prestasi Mahasiswa Tingkat Nasional (Diselenggarakan PT lain)	Prestasi	15	20	30	35	40	45
3	Jumlah Prestasi Mahasiswa Tingkat Nasional (Diselenggarakan UNS)	Prestasi	10	12	15	17	19	20
4	Jumlah Prestasi Mahasiswa Tingkat Internasional	Prestasi	3	4	5	6	7	8
5	Jumlah PKM yang didanai Ditjen Belmawa Kemenristekdikti	Judul	10	10	11	11	12	12

K-06	Peningkatan Layanan Kesejahteraan Mahasiswa							
1	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa	Mhs	1341	1350	1355	1360	1365	1370
2	Jumlah nominal beasiswa yang diberikan UNS	Miliar	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1
Sasaran Strategis 2: Akselerasi Riset, Publikasi dan Inovasi								
KEGIATAN & INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Satuan	Base-line	TARGET				
K-07	Peningkatan Kuantitas & Kualitas Riset (AKADEMIK)			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah <i>joint research</i> bersama pakar di dalam & luar negeri	Judul	20	21	22	23	24	25
2	Total anggaran riset dari lembaga donor internasional	M-Rupiah	0,5	0,5	0,60	0,65	0,70	0,75
3	Total anggaran riset dari industri nasional	M-Rupiah	0	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12
4	Jumlah judul riset didanai PNBPN UNS	Judul	135	141	143	145	147	150
5	Jumlah judul riset didanai lembaga donor internasional	Judul	4	4	5	5	6	6
6	Total anggaran riset kompetitif nasional yang diraih	J-Rupiah	6841	7625	7700	7800	7900	8000
7	Persentase anggaran riset terhadap total anggaran PNBPN UNS	%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
K-08	Peningkatan Diseminasi Hasil Riset (AKADEMIK)							
1	Jumlah artikel terbit di jurnal terakreditasi nasional	Judul	43	45	47	49	51	53
2	Jumlah artikel terbit di prosiding internasional terindeks SCOPUS	Judul	226	268	280	300	310	320
3	Jumlah artikel terbit di jurnal internasional terindeks SCOPUS	Judul	88	131	140	150	160	170
4	Jumlah publikasi terindeks SCOPUS hasil kolaborasi riset dengan PT/Industri Internasional	Judul	3	4	5	6	7	8
5	Jumlah dosen penulis artikel di jurnal internasional terindeks SCOPUS	Dosen	70	102	110	120	130	140

6	Jumlah sitasi	Sitasi	550	748	1200	1300	1.400	1.500
7	Jumlah buku teks, book chapter, hasil riset FKIP UNS	buku	KPPMF					
K-09 Peningkatan Inovasi UNS (AKADEMIK)								
1	Jumlah produk inovasi FKIP UNS	Inovasi	4	6	9		14	15
2	Jumlah HAKI atau Paten yang didaftarkan	Invensi	67	69	75	80	85	90
3	Jumlah penghargaan inovasi FKIP UNS tingkat nasional	Inovasi	0	2	3	4	5	6
4	Jumlah penghargaan inovasi FKIP UNS tingkat internasional	Inovasi	1	2	2	3	3	3
5	Jumlah Pusat Unggulan IPTEK (PUI)	Unit	0	1	1	1	1	1
6	Jumlah penghargaan tingkat nasional di bidang karya desain/seni/budaya/olah raga	Penghargaan	2	2	3	4	5	6
7	Jumlah penghargaan tingkat internasional di bidang karya desain/seni/budaya/olah raga	Penghargaan	0	1	1	2	2	2
8	Jumlah Prototipe Research & Development	prototype	2	5	6	8	10	12
9	Jumlah Prototipe Industri	prototype	0	1	1	2	2	2
K-10 Peningkatan Diseminasi Karya Inovatif (AKADEMIK)								
1	Jumlah pergeleran produk inovasi atau karya/seni/budaya berskala nasional	Kegiatan	8	9	10	11	12	13
2	Jumlah pergeleran produk inovasi atau karya/seni/budaya berskala internasional	Kegiatan	0	1	1	2	2	2
3	Jumlah produk yang diinkubasi inkubator bisnis UNS	produk	0	0	1	1	1	1
K-11 Peningkatan Kualitas Manajemen Publikasi (AKADEMIK)								
1	Jumlah jurnal FKIP UNS bereputasi nasional	Jurnal	3	5	10	12	14	16

2	Jumlah jurnal FKIP UNS bereputasi global (terindeks SCOPUS)	Jurnal	0	0	0	1	1	1	
3	Jumlah buku (buku teks maupun buku ajar), e-book, e-journal yang diterbitkan/dikelola FKIP UNS	Judul	56	71		111	113	115	
K-12 Peningkatan Kualitas Pengabdian pada Masyarakat Berbasis Riset (AKADEMIK)									
1	Jumlah <i>spin-off</i> atau <i>start-up companies</i> yang didirikan sebagai hasil P2M	Perusahaan	0	0	1	1	1	1	
2	Jumlah paket kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis riset	Kegiatan	45	48	51	54	57	60	
3	Total anggaran untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat	Milyar	1,29	1,42	1,50	1,60	1,70	1,80	
Sasaran Strategis 3: Akselerasi Reorientasi Pembelajaran Berbasis 4.0									
KEGIATAN & INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			SATUAN	BASE-LINE	TARGET				
K-13	Penyelenggaraan Pendidikan Berkualitas				2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase mahasiswa S-1 lulus tepat waktu (4 tahun)	Persen	31,56	44,85	50	53	56	60	
2	Persentase mahasiswa S-2 lulus tepat waktu (2 tahun)	Persen	37,39	37,64	38	40	41	42	
3	Persentase mahasiswa S-3 lulus tepat waktu (3 tahun)	Persen	0	1,07%	1,60%	2,14%	2,67%	3,21%	
						80	85	90	
K-14 Pengembangan Pendidikan Berkualifikasi Internasional (AKADEMIK)									
1	Jumlah mahasiswa asing peserta <i>student exchange</i> di FKIP	Mahasiswa	11	19	21	23	25	27	
2	Jumlah dosen asing peserta pertukaran di FKIP	Orang	3	5	8	10	12	14	
3	Jumlah dosen internasional di FKIP	Orang	15	22	25	30	37	45	
4	Jumlah mahasiswa internasional	Orang	9	11	13	15	17	20	
5	Jumlah negara asal mahasiswa	Negara	2	3	3	4	4	5	
6	Jumlah Program Gelar Ganda (<i>Double Degree</i>)	Program	0	0	0	1	1	1	

7	Jumlah Program Bersama (<i>Joint Degree</i>)	Program	0	0	0	1	1	1
8	Jumlah Program Pendidikan Pendek Internasional	Program	1	2	2	3	3	4
9	Jumlah Program Studi Kelas Internasional	Prodi	0	0	0	0	1	1
10	Jumlah Program Studi Tersertifikasi Internasional	Prodi	0	1	1	1	1	1
11	Jumlah Program Studi Terakreditasi Internasional	Prodi	0	0	0	3	5	6
K-15 Peningkatan Pembelajaran Berbasis TIK (AKADEMIK)								
1	Persentase mata kuliah disampaikan menggunakan sistem pembelajaran daring (<i>spada</i>)	%	33%	53%	60%	70%	75%	80%
2	Persentase mata kuliah yang materinya tersedia secara online (<i>open courseware</i>)	%	20%	25%	70%	80%	90%	100%
K-16 Peningkatan Kapasitas Kinerja Laboratorium								
1	Jumlah laboratorium bersertifikat	Sertifikat	0	0	0	1	2	3
2	Jumlah laboratorium khusus riset	Unit	0	0	0	1	2	3
3	Jumlah laboratorium pembelajaran	Unit	5	5	5	6	6	6
K-17 Perluasan Akses Pendidikan								
1	Jumlah provinsi asal mahasiswa	Provinsi	23	24	25	26	27	28
2	Jumlah mahasiswa penerima program Bidikmisi	Mahasiswa	2400	2450	2470	2490	25100	25200
3	Persentase mahasiswa dengan UKT Level 1 dan Level 2	%	22%	23,45%	24,00%	24,50%	25,50%	26,00%
4	Jumlah mahasiswa program afirmasi	Mahasiswa	11	4	6	8	10	12
5	Jumlah Program Studi Di luar Kampus Utama	Prodi	0	0	0	1	1	1
K-18 Peningkatan Kualitas Calon Peserta Didik								
1	Rasio keketatan seleksi masuk Program Sarjana	Rasio	1 : 13	1 : 13	1 : 15	1 : 15	1 : 16	1 : 17
2	Rasio keketatan seleksi masuk Program Magister	Rasio	1 : 1,3	1 : 1,6	1 : 1,7	1 : 1,8	1 : 1,9	1 : 2
3	Rasio keketatan seleksi masuk Program Doktor	Rasio	1 : 1,25	1 : 1,6	1 : 1,7	1 : 1,8	1 : 1,9	1 : 2
4	Rasio keketatan seleksi masuk Program Vokasi	Rasio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Rerata nilai Ujian Seleksi Masuk Nasional	Nilai	566,57	592,31	595	598	600	605

6	Persentase mortalitas (Camaru yang tidak daftar ulang)	%	18,6	14,75	13	12	11	10
K-19 Peningkatan Kualitas Perpustakaan								
1	Jumlah koleksi buku, ebook	Judul	1729	1850	5	6	7	8000
2	Jumlah koleksi jurnal, e-journal	Judul	2	3	12:08	12:09	13	14000
3	Jumlah koleksi non buku dan non jurnal	Judul	612	650	57:05:00	60	62	65000
4	Rata-rata harian jumlah pengunjung	Orang	6000	6500	01:03	01:05	01:07	2000
5	Tingkat Kepuasan Pengunjung perpustakaan	Skala 1-4	3,05	3,14	3,2	3,3	3,3	3,3
K-20 Pengembangan Layanan Karir Mahasiswa & Alumni (MAWA)								
1	Jumlah petugas khusus pengembangan karir mahasiswa dan alumni	Orang	0	0	23	23	23	23
2	Persentase lulusan bekerja dalam waktu kurang dari enam bulan	Persen	85	86	87	88	89	90
3	Jumlah alumni yang bekerja di institusi/perusahaan internasional	Orang	6	8	9	10	11	12
4	Jumlah perusahaan/lembaga internasional tempat bekerja alumni	Perusahaan	5	5	6	7	8	9
5	Jumlah perusahaan internasional tempat magang	Perusahaan	6	7	8	9	10	11
6	Jumlah negara lokasi perusahaan atau lembaga tempat alumni bekerja	negara	2	3	4	4	5	5
7	Indeks kepuasan perusahaan tempat alumni bekerja	Index	NA	NA	NA	3	3,3	3,3
K-21 Pengembangan Keterampilan Wirausaha								
1	Jumlah proposal PKM-K yang didanai DIKTI	Proposal	3	4	5	6	7	8
2	Jumlah Mahasiswa berwirausaha	Mahasiswa	14	31	40	50	60	70
3	Jumlah perusahaan mitra wirausaha mahasiswa	Perusahaan	10	20	25	30	40	50
K-22 Peningkatan Partisipasi Alumni (MAWA)								

1	Jumlah kegiatan akademik & non-akademik yang melibatkan alumni	Kegiatan	63	75	80	85	90	100
2	Jumlah provinsi tempat alumni bekerja (data propinsi tempat alumni bekerja)	Wilayah	32	32	33	33	34	34
Sasaran Strategis 4: Akselerasi Pengembangan Institusi, Penguatan literasi Data & Teknologi (ICT)								
KEGIATAN & INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			SATUAN	BASE-LINE	TARGET			
K-23	Peningkatan Efektivitas Manajemen Operasional Lembaga			2019	2020	2021	2022	2023
1	Akreditasi Institusi	Status	A	A	A	A	A	A
2	Peringkat Perguruan Tinggi Nasional	Peringkat	17	12	11	10	10	9
3	Persentase prodi Sarjana terakreditasi A	%	72%	72%	87%	87%	87%	91%
4	Persentase prodi Magister terakreditasi A	%	29%	29%	35%	35%	35%	41%
5	Persentase prodi Doktor terakreditasi A	%	20%	20%	20%	20%	40%	40%
6	Persentase prodi Diploma terakreditasi A	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	Tingkat kepuasan pengguna jasa (stakeholders)	Skala 1 - 4	3,2	3,3	3,35	3,4	3,45	3,5
K-24	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Aset							
1	Jumlah pendapatan non-UKT yang dihasilkan dari penggunaan aset	M-rupiah	0,05	0,05	0,05	0,06	0,065	0,7
2	Jumlah kerusakan berat aset	%	5	2,4	2,3	2,0	2,0	2,0
3	Persentase ketersediaan asset/alat ketika diperlukan	%	60%	70%	72%	75%	80%	85%
4	Persentase jumlah kerusakan berat aset	%	5,0%	2,4%	2,3%	2,2%	2,1%	2,0%
5	Indeks Kepuasan Pengguna Aset	Skala 1-4	3	3	3,2	3,3	3,34	3,34
6	Persentase fasilitas dengan akses untuk diffable	%	15,8%	16,3%	18,0%	20,0%	22,0%	25,0%
K-25	Peningkatan Kualitas Sistem Informasi							
1	Durasi pencarian data yang dibutuhkan	Menit	11	10	10	10	10	10
2	Durasi penelusuran dokumen/arsip aktif	Menit	11	10	8	7	6	5

3	Durasi penelusuran dokumen/arsip inaktif	Menit	25	25	22	19	17	15	
4	Persentase akurasi data yang dihasilkan	%	98	99	100	100	100	100	
5	Kapasitas Bandwidth	Mbps	20100	20100	20100	20100	20100	20100	
6	Domain Rating laman FKIP	Rate	80	85	88	80	90	92	
7	Persentase internet coverage di kampus	%	92	92	92	92	92	92	
K-26 Pengembangan Wawasan Peduli Lingkungan									
1	Persentase warga UNS yang menggunakan kendaraan bermesin milik pribadi	Persen	NA	80	75	70	60	50	
2	Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Unit	0	0	0	0	0	0	
3	Persentase area Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	NA	40%	40%	40%	40%	40%	
4	Persentase anggaran untuk keperluan energi (listrik & BBM)	%	NA	2%	2%	2%	2%	2%	
K-27 Peningkatan Kualitas Tata Kelola RS Pendidikan									
1	Kelas Rumah Sakit	Skala A-D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
2	Indeks Kinerja Rumah Sakit	Skala 1-4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Sasaran Strategis 5: Optimalisasi Hukum, Birokrasi dan Kerja Sama									
KEGIATAN & INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			SATUAN	BASELINE	TARGET				
K-28	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan				2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini auditor eksternal	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Daya serap anggaran	%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
3	Jumlah kasus korupsi yang dinyatakan bersalah	Kasus	0	0	0	0	0	0	
K-29 Peningkatan Jumlah Pendapatan Non-UKT									
1	Jumlah unit usaha penghasil pendapatan (Revenue Generating Unit - RGU)	unit	2	2	2	3	4	4	
2	Nilai pendapatan (fresh money) yang hasil kerjasama	Milyar	10	10	5,5	5	4,5	4	

3	Nilai pendapatan (fresh money) yang dihasilkan RGU	Milyar	10	10	10	10	10	10
4	Nilai endowment fund	Milyar	0	0,1	0,15	0,15	0,2	0,2
K-30	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Arsip & Optimalisasi Hukum							
1	Durasi penelusuran dokumen/arsip aktif	menit	11	10	8	7	6	5
2	Durasi penelusuran dokumen/arsip inaktif	menit	25	25	22	19	17	15
K-31	Pengembangan Jejaring Kerja Sama							
1	Rasio kerj asama aktif terhadap MoU tingkat nasional	Rasio	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 4	1 : 4	1 : 4
2	Rasio kerja sama aktif terhadap MoU tingkat internasional	Rasio	1 : 3	1 : 3	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2
3	Jumlah alumni yang bekerja di perusahaan internasional	Orang	6	8	10	12	14	16
K-32	Peningkatan Reputasi Internasional							
1	Jumlah akademisi internasional mitra akademisi UNS	Orang	NA	75	80	100	120	150
2	Jumlah mitra dari industri internasional	Institusi	NA	8	12	15	17	20
3	Nilai reputasi akademik UNS	Point	NA	17,3	17,3	20	25	27
4	Nilai reputasi industri internasional terhadap UNS	Point	NA	10,5	12,5	15	18	20

4.4 Strategi Pendanaan FKIP UNS Melalui Penguatan Pendapatan di Non UKT

Pendapatan dan penerimaan FKIP UNS diperoleh dari UKT dan juga non-UKT. Penerimaan non-UKT meliputi penerimaan melalui kontrak kerjasama atau usaha dan bantuan pemerintah melalui BOPTN. Besaran bantuan pemerintah melalui BOPTN sangat dipengaruhi oleh penerimaan pendapatan UNS melalui kerjasama dan usaha yang dilaksanakan di tingkat fakultas dan universitas. Semakin besar penerimaan UNS melalui kerjasama dan usaha maka semakin besar pula bantuan pemerintah melalui BOPTN yang diterimakan pada tahun selanjutnya. Dana BOPTN yang diterima FKIP UNS sebanding dengan jumlah penerimaan FKIP UNS dari kerjasama yang dikelola dan dilaksanakan FKIP UNS dengan berbagai pihak.

Sebagaimana diatur dengan Permenristekdikti No 73/2017, UNS telah memiliki unit yang bertanggung jawab atas pengembangan usaha, yaitu Badan Pengelola Usaha (BPU). Strategi pengembangan BPU tidak hanya berkonsentrasi pada pemanfaatan aset fisik, tetapi juga pada aset intelektual, termasuk pada program hilirisasi produk riset UNS. Untuk tujuan hilirisasi riset ini, BPU berkoordinasi dengan pusat studi yang berada di LPPM UNS dan unit pengembangan usaha yang ada di tingkat fakultas. Berdasarkan mekanisme ini, hilirisasi hasil riset FKIP UNS yang berupa aset intelektual dikembangkan dalam bentuk usaha layanan konsultasi dan pengembangan pendidikan untuk masyarakat. Usaha yang berbasis hilirisasi riset pendidikan ini dikelola oleh *Education Develepment Center* (EDC). Hilirisasi produk aset intelektual hasil riset pendidikan FKIP UNS ini dikembangkan dengan berbasis pada keunggulan bidang pendidikan yang dihasilkan FKIP UNS, baik yang sudah ada di dalam FKIP UNS sendiri maupun dengan pusat keunggulan yang dikembangkan melalui kerjasama FKIP UNS dengan lembaga lain.

4.5 Proyeksi Pendapatan

Rencana Strategis Bisnis FKIP UNS sudah menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) setiap Program dan Kegiatan guna mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan universitas. IKU dan IKK FKIP UNS tersebut kemudian dijadikan target kinerja FKIP UNS. Untuk mencapai target kinerja berupa IKK dan IKU tersebut, seluruh prodi dan unit di FKIP UNS kemudian menyusun program dan kegiatan tahunan dengan terlebih dahulu merencanakan kebutuhan anggaran dan proyeksi pendapatan agar kegiatan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik. Proyeksi Pendapatan dan Anggaran Belanja FKIP UNS diusulkan kepada universitas yang

kemudian diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapat persetujuan. Persetujuan tersebut dituangkan dalam anggaran belanja melalui Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dalam bentuk Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja, yang dalam hal ini, UNS merupakan Perguruan Tinggi dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PT PK-BLU). Selanjutnya, FKIP UNS menerima alokasi dana dalam bentuk dana RBA berdasarkan usulan yang disetujui universitas.

Setiap akhir tahun, Dekan melaporkan pendapatan dan serapan FKIP UNS kepada Rektor dan menyampaikan rencana pendapatan tahun berikutnya, yang selanjutnya akan dilaporkan Rektor kepada Kementerian Keuangan. Kemudian Kementerian Keuangan menyetujui untuk kemudian menjadi dasar penerimaan DIPA tahun berikutnya.

Jenis pendapatan FKIP UNS merupakan bagian dari pendapatan Perguruan Tinggi yang dikelompokkan sebagai berikut.

1) Pendapatan Jasa Pelayanan

a. Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan

FKIP UNS memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat dalam bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. FKIP UNS menerima imbal jasa dari masyarakat pengguna jasa pendidikan (dalam hal ini mahasiswa) yang kemudian disebut dengan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan yang ditarik dari masyarakat sebagai SPP dengan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Selain itu, FKIP UNS juga memperoleh pendapatan dalam bentuk Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang dikenakan bagi mahasiswa Sarjana jalur masuk Seleksi Mandiri (SM) dan mahasiswa Pascasarjana mulai tahun 2019.

b. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah pendapatan yang diterima oleh FKIP UNS sebagai bentuk sumbangan dari pihak lain tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan kepada pihak pemberi hibah. Pendapatan hibah ada dua jenis yaitu terikat dan tidak terikat. Hibah terikat adalah hibah yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi hibah diperlakukan sesuai peruntukannya. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Sedangkan hibah tidak terikat adalah hibah yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi hibah. Pendapatan ini dapat berasal dari perorangan, lembaga/badan usaha, Pemerintah Daerah, negara dan lainnya. Bentuk hibah dapat berupa uang atau barang/jasa.

c. Pendapatan Jasa Layanan Lainnya

Pendapatan jasa lainnya adalah pendapatan yang diterima oleh FKIP UNS sebagai bentuk kerjasama dengan pihak lain atas dasar perjanjian kerjasama dan pendapatan lain yang dianggap sah.

2) Pendapatan RM, RMP, dan PHLN

Pendapatan RM, RMP dan PHLN FKIP UNS didasarkan pada formulasi proyeksi pendapatan universitas sebagai berikut:

1. Mencatat realisasi pendapatan tiga tahun terakhir,
2. Menghitung tingkat pertumbuhan pendapatan untuk masing-masing kelompok pendapatan,
3. Menghitung trend pendapatan tahun-tahun sebelumnya (t-1 s.d. t-3),
4. Menggunakan trend tersebut untuk menghitung proyeksi pendapatan tahun berikutnya (t+1).

4.6 Proyeksi Belanja

Anggaran belanja FKIP UNS disusun pada tahun sebelumnya dan diajukan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapat persetujuan dalam bentuk DIPA melalui universitas. DIPA dikeluarkan akhir tahun untuk menjalankan Program dan Kegiatan pada tahun berikutnya. Poyeksi belanja FKIP UNS disusun dengan langkah-langkah yang dilaksanakan universitas sebagai berikut:

1. Menghitung realisasi belanja tahun sebelumnya (t-1) dan tahun ini (t)
2. Membandingkan target dan realisasi pada tahun (t-1) sampai dengan (t-n)
3. Mengukur tren realisasi belanja,
4. Membandingkan selisih realisasi dengan tahun sebelumnya,
5. Menghitung proyeksi tahun (t+1)

BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi

Rencana strategis bisnis (RSB) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret tahun 2019–2023 ini adalah sistem rencana pengembangan jangka menengah (RPJM) dengan rentang waktu empat tahunan dan merupakan bagian dari satu kesatuan sistem perencanaan pengembangan jangka panjang (RPJP) FKIP UNS Tahun 2011—2031, yang kemudian diperbaharui dengan RPJP FKIP UNS Tahun 2018—2038. Penyusunan RSB FKIP UNS ini berpedoman pada RSB UNS Tahun 2019—2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pendidikan Tinggi Tahun 2005—2025. RPJM FKIP UNS Tahun 2019-2023 memuat visi, misi, tujuan, dan program pengembangan yang akan dilaksanakan oleh Dekan terpilih 2019—2023.

Masa jabatan Dekan FKIP UNS terpilih Tahun 2019—2023 akan berakhir pada bulan Mei 2023. Sementara itu, dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagai perencanaan dan penganggaran tahunan sudah harus diajukan setahun sebelum tahun berjalan. Dengan demikian, RBA tahun 2023 disusun berdasarkan RSB FKIP UNS 2019—2023 karena RSB FKIP UNS 2023—2026 belum disusun. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kesinambungan dalam penyelenggaraan program kegiatan FKIP UNS dan memastikan bahwa pada akhir periodisasi dari dokumen renstra bisnis ini tidak akan terjadi kekosongan regulasi, maka ditetapkan dua ketentuan sebagai berikut.

- 1) Dekan FKIP UNS terpilih Tahun 2023—2026 dapat terus melaksanakan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen RSB FKIP UNS Tahun 2019—2023 sampai tersusunnya RPJM FKIP UNS Tahun 2023—2026;
- 2) Sambil menunggu penetapan dokumen RPJM FKIP UNS Tahun 2023—2026, penyusunan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) FKIP UNS Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dalam renstra bisnis FKIP UNS Tahun 2019—2023 dengan memperhatikan arah RPJP FKIP UNS 2011—2031;

5.2 Kaidah Pelaksanaan

RSB FKIP UNS Tahun 2019—2023 dijadikan sebagai landasan oleh fakultas, program studi, unit kerja di lingkungan FKIP UNS, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan ke dalam dokumen rencana

pengembangan empat tahunan dan rencana pengembangan dua puluh tahunan. Berkaitan dengan hal itu, dalam Rencana Strategi Bisnis FKIP UNS Tahun 2019—2023 perlu dirumuskan tujuh kebijakan tentang kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

1. Dekan dan jajaran pimpinan di tingkat fakultas, program studi, dan unit-unit di lingkungan FKIP UNS berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai ketetapan dalam dokumen RSB FKIP UNS ini dengan penuh tanggung jawab;
2. Dekan dan Wakil Dekan, dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan program kegiatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan sesuai dengan dokumen RSB FKIP UNS Tahun 2019—2023;
3. Untuk menjamin agar *Key Performance Indicator* (KPI) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) setiap program dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya para Wakil Dekan berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RSB FKIP UNS Tahun 2019—2023;
4. Semua program studi dan unit di lingkungan FKIP UNS berkewajiban untuk menjabarkan RSB FKIP UNS Tahun 2019—2023 ke dalam dokumen RSB Tahun 2019—2023 tiap-tiap program studi/unit dan menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) setiap tahun;
5. Dalam upaya menjamin efisiensi dan efektivitas dalam Rencana Strategi Bisnis FKIP UNS Tahun 2019—2023, Dekan dan Wakil Dekan berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh program studi dan unit pendukung dalam perumusan rencana kerja masing-masing;
6. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RSB FKIP UNS tahun 2019—2023, Dekan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen rencana dan pelaksanaannya dengan dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Satuan Pengawas Internal (SPI) UNS;

Bilamana target capaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan dalam dokumen RSB FKIP UNS ini tidak dapat/sulit dicapai yang disebabkan oleh berbagai kendala yang bersifat eksternal, dokumen RSB FKIP UNS ini dapat dilakukan revisi dan penyesuaian.